

**KEBUTUHAN SARANA PERKOTAAN DI CAKKE
SEBAGAI IBUKOTA KECAMATAN ANGGERAJA
KABUPATEN ENREKANG**

Disusun dan Diajukan oleh

**RACHMAT ANDA NAPPASA
NIM. 45 08 042 011**

UNIVERSITAS



Skripsi

**JURUSAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR
2021**

**KEBUTUHAN SARANA PERKOTAAN DI CAKKE
SEBAGAI IBUKOTA KECAMATAN ANGGERAJA
KABUPATEN ENREKANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah satu Syarat Untuk
Menperoleh Gelar Sarjana Teknik (S.T)

BOSOWA

Oleh :

RACHMAT ANDA NAPPASA

45 08 042 011

**JURUSAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR
2 0 18**

LEMBAR PENGESAHAN

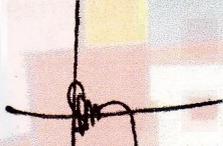
**KEBUTUHAN SARANA PERKOTAAN DI CAKKE SEBAGAI
IBUKOTA KECAMATAN ANGGERAJA
KABUPATEN ENREKANG**

Disusundandiajukanoleh:

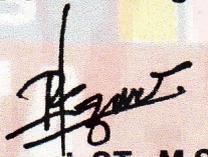
**RACHMAT ANDA NAPPASA
NIM. 45 08 042 011**

Menyetujui:

Pembimbing I


Dr. Ir. Syafri, M.Si
NIDN : 09-050768-04

Pembimbing II


Rusneni, ST., M.Si
NIDN:09-150386-02

Mengetahui:

**Dekan Fakultas
Teknik Universitas Bosowa Mak**


Dr. Ridwan, ST., M.Si
NIDN: 09-101271-01

**Ketua Program
Studi Perencanaan Wilayah dan**


Dr. Ir. Rudi Latief, M.Si
NIDN/09-170768-01

HALAMAN PENERIMAAN

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Teknik Universitas Bosowa Makassar, Nomor. A.414/SK/FT/UNIBOS/VI/2021 pada tanggal 8 Juni 2021 Tentang Panitia dan Pengangkatan Dosen Penguji Ujian Akhir Mahasiswa Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, maka :

Pada hari/tanggal : Senin, 26 Maret 2018
Skripsi atas nama : RACHMAT ANDA NAPPASA
NIM : 45 08 042 011

Telah diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi Sarjana Negara Fakultas Teknik Universitas Bosowa Makassar, telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Skripsi Sarjana Negara dan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana Negara Jenjang Strata Satu (S-1), pada Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Bosowa Makassar.

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. S. Kamran Aksa, ST., MT

Sekretaris : Jupriadi, ST., MSP

Anggota : 1. Dr. Ir. Syafri, M.si

2. Rusneni, ST., M.Si

Dekan Fakultas Teknik
Universitas Bosowa Makassar


Dr. Ridwan, ST., M.Si
NIDN: 09-101271-01

Ketua Program Studi
Perencanaan Wilayah dan Kota


Dr. Ir. Rudi Latief, M.Si
NIDN: 09-170768-01

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rachmat Anda Nappasa

NIM : 45 08 042 011

Program Studi : Perencanaan Wilayah dan Kota

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, Januari 2018



Yang menyatakan,

Rachmat Anda Nappasa

ABSTRAK

Rachmat Anda Nappasa. “Kebutuhan Sarana Perkotaan Di Cakke Sebagai Ibukota Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang”. (dibimbing oleh Ir. Dr. Ir. Sayfri, M.Si dan Rusneni, ST. M.Si).

Kecamatan Anggeraja Sebagai pusat pelayanan maka perlu untuk mengkaji jenis dan jumlah sarana perkotaan yang dibutuhkan berdasarkan fungsi kota dan kebutuhan penduduk di dalamnya dan penduduk dari daerah hinterlandnya.

Penelitian ini untuk mengetahui tingkat kebutuhan sarana di Cakke Sebagai ibu Kota Kecamatan untuk menunjang fungsinya sebagai pusat pelayanan terhadap Kecamatan Anggeraja serta untuk menentukan kebutuhan sarana perkotaan di Cakke. sehingga dapat menunjang fungsinya sebagai ibukota kecamatan di Anggeraja. Penelitian ini menggunakan kuantitatif dan kualitatif untuk mengukur sebaran dan jumlah sarana di kecamatan Anggeraja dengan menggunakan (Analisis Skoring) guna merumuskan serta menentukan kebutuhan sarana di kecamatan anggeraja.

Dari hasil analisis tingkat ketersediaan sarana perkotaan di Cakke sebagai Ibu Kota Kecamatan dikategorikan baik dengan penilaian bobot rata-rata berada di atas 95 %. Walaupun masih terdapat beberapa sarana yang tidak maksimal pelayanannya seperti posyandu dan sarana yang sama sekali belum terdapat di lokasi yaitu Pemadam Kebakaran dan GOR. Berdasarkan hasil proyeksi penduduk maka sarana perkotaan yang dibutuhkan di Cakke pada tahun 2037 diantaranya, Kantor Pemadam Kebakaran sebanyak 1 unit, 2 unit TK, 2 unit posyandu dan 3 unit Balai Pengobatan.

Kata Kunci : *Sarana dan pelayan masyarakat*

Kata Pengantar

Puji syukur penulis panjatkan kepada kehadiran Allah SWT karena atas berkat dan karunian-NYA sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya hingga akhir zaman.

Penulis skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Bosowa. Judul yang penulis ajukan adalah “Strategi Pengembangan Kawasan Agrobisnis Desa Sumillan Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang”.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati menyampaikan terimah kasih kepada yang terhormat :

1. Kedua orang tuaku, Bapak Anda Nappasa dan Ibu Nuriani Lonchok Panda yang terus memberikan semangat dan dukungan moril maupun material , serta segala doa mereka.
2. Bapak Dr.Hasmina,ST.M.Si Selaku Dekan Fakultas Teknik yang telah mengesahkan Secara resmi skripsi yang telah dibuat oleh penulis.

3. Jufriadi, ST.MSp Selaku ketua program Studi Perencanaan wilayah dan Kota yang telah memberaikan dukungan kepada penulis dan mengesahkan secara resmi skripsi yang telah dibuat oleh penulis.
4. Ibu Dr. Syafri. M.Si dan Rusneni. ST. M.Si Selaku pembimbing I dan Pembimbing II penulis yang telah memberikan bimbingan, nasehat serta waktunya selama penelitian dan penulisan skripsi ini. Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT.
5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Teknik Universitas Bosowa yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu selama mengikuti perkuliahan sampai akhir penulisan skripsi.
6. Bapak/Ibu Staf Tata Usaha Fakultas Teknik Universitas Bosowa Yang telah banyak membantu dan memberikan kelancaran dalam proses perkuliahan hingga penulisan skripsi
7. Seluruh teman-teman prodi Teknik Planologi angkatan 2008 khususnya (Arifin, Jumaun, Mbojho, Ashari, Bang Mail, Fadli, Isran, Subur, Bang Edi, Bang Ben, Bang Aswin). Masuk bersama-sama, maka luluspun harus bersama-sama. Semangat mengerjakan skripsi dan gelar reseps.
8. Seluruh teman-teman KKN saya yang senantiasa selalu bertanya, "Apa Kabar Skripsi?", pertanyaan itu membuat saya segera ingin menyelesaikan ini dengan cepat.

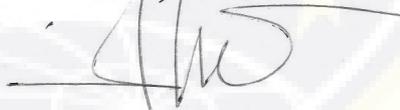
DAFTAR ISI

9. Secara khusus dan tulus penulis ucapkan terima kasih kepada Keluarga Besar Blok F di antaranya Kang Musdar, ST, Kakanda Ariel, Maladi Mastamil, ST, Muh Jumadil Adzan T.SE, Rahmat M, Kharisma Zulma, Indrajit T,

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan walaupun telah menerima bantuan dari berbagai pihak. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis dan bukan parapemberi bantuan. Kritik dan saran yang membangun akan kami harapkan demi menyempurnakan skripsi ini. Semoga skripsi ini dengan harapan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Makassar,

Penulis,



Rachmat Anda Nappasa

DAFTAR ISI

SAMPUL	I
HALAMAN PENGESAHAN	II
HALAMAN PERNYATAAN.....	III
KATA PENGANTAR	IV
DAFTAR ISI	VII
DAFTAR TABEL	X
DAFTAR GAMBAR	XII
ABSTRAK	XII
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang	1
B. Rumusah masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
D. Ruang Lingkup Pembahasan	5
E. Sistematika Pembahasan	5
BAB II TINJAUWAN PUSTAKA	
A. Wilayah Perkotaan	7
1. Defenisi Wilaya Perkotaan	9
2. Pengembangan Kota	10
3. Sarana Dan Prasarana Perkotaan	12
4. Sarana Lingkungan Perkotaan	14
5. Fasilitas Sarana Perkotaan	15
a. Fasilitas Pendidikan	15
b. Sarana Kesehatan	18

c. Sarana Peribadatan	21
d. Sarana Perdagangan	21
e. Sarana Ruang Terbuka, Taman/ Tempat Bermain/ Olahraga	23
f. Sarana Kebudayaan Dan Rekreasi	24
g. Pemerintahan Dan Pelayanan Umum	24
6. Kebutuhan	26
7. Penentuan lokasi Kegiatan di Daerah Perkotaan	26

BAB III METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian	29
B. Jadwal Penelitian	30
C. Jenis Dan Sumber Data	30
1. Jenis Data	30
2. Sumber Data	30
D. Metode Pengumpulan Data	31
E. Metode Analisis	31
F. Definisi Operasional	33
G. Kerangka Berfikir	35

BAB IV DATA DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	36
1. Tinjauan umum Wilayah Kecamatan Anggeraja	36
a. Karakteristik Geografis Wilayah	36
b. Topografi	38
c. Jenis Tanah Dan Batuan	39

d. Penggunaan Lahan	40
e. Kependudukan	41
f. Sarana Pelayanan Sosial dan Ekonomi di kecamatan Anggeraja	43
1) Fasilitas Pemerintahan dan Pelayanan Umum	43
2) Sarana Pengadaan Dan Jasa	45
3) Sarana Pendidikan	46
4) Sarana Peribadatan	47
5) Sarana Kesehatan	48
2. Karakteristik Pembangun Kota Cakke	49
a. Peranan Dan Pungsi Kota Cakke	49
b. Karakteristik Fisik Kota Cakke	52
1) Batasan dan Luas Wilayah	52
2) Ketinggian Dan Kemiringan Lereng	52
3) Kondisi Hidrologi	55
4) Pola Penggunaan Lahan	55
5) Sarana Pelayanan Sosial dan Ekonomi di Kota Cakke	57
6) Kajian Kependudukan Kota Cekke	67
7) Pertumbuhan dan Proyeksi Penduduk	67
8) Distribusi dan Kepadatan Penduduk	70
B. Pembahasan	71
1. Analisa Ketersediaan Sarana Perkotaan di Kota Cakke sebagai Ibukota Kecamatan	71
a. Indentifikasi sarana Perkotaan Skala Ibu Kota Kecamatan	

di Cakke	72
b. Penilaian Terhadap Tingkat Ketersediaan Sarana Perkotaan yang Terdapat Di Kota Cak.....	74
2. Analisis Kebutuhan Sarana Perkotaan di Cakke Sebagai ibukota	
3. Kecamatan Tahun 2029	78
a. Sarana Pemerintahan Dan Layanan Umum	78
b. Sarana Pendidikan	79
c. Sarana Peribadatan	79
d. Sarana Kesehatan	80
e. Sarana Perdagangan	81
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	81
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	82

DAFTAR TABEL

<i>Tabel 21 Standar kebutuhan berdasarkan penduduk untuk</i>	
<i> sarana pendidikan</i>	<i>17</i>
<i>Tabel 22. Standar Kebutuhan Menurut Penduduk Untuk</i>	
<i> Sarana kesehatan</i>	<i>20</i>
<i>Tabel 4.1 Luas Dan Ketinggian Masing Masing Desa /</i>	
<i> Kelurahan</i>	<i>38</i>
<i>Tabel 4.2 Penggunaan Lahan Kecamatan Anggeraja</i>	<i>40</i>
<i>Tabel 4.3 Perkembangan Jumlah Penduduk</i>	<i>41</i>
<i>Tabel 4.4 Distribusi dan Kepadatan Penduduk di</i>	
<i> Kecamatan</i>	
<i> Anggeraja</i>	<i>42</i>
<i>Tabel 4.5 Jenis dan Jumlah Sarana Pemerintahan dan</i>	
<i> Pelayanan</i>	
<i> Umum di Kecamatan Anggeraja</i>	<i>44</i>
<i>Tabel 4.6 Jumlah dan Jenis Sarana Perdagangan di</i>	
<i> Kecamatan</i>	
<i> Anggeraja</i>	<i>45</i>
<i>Tabel 4.7 jenis dan Jumlah Sarana Pendidikan di</i>	
<i> Kecamatan</i>	
<i> Anggeraja</i>	<i>46</i>
<i>Tabel 4.8 jenis dan Jumlah Tempat Peribadatan Di</i>	
<i> Kecamatan</i>	
<i> Anggeraja.....</i>	<i>47</i>

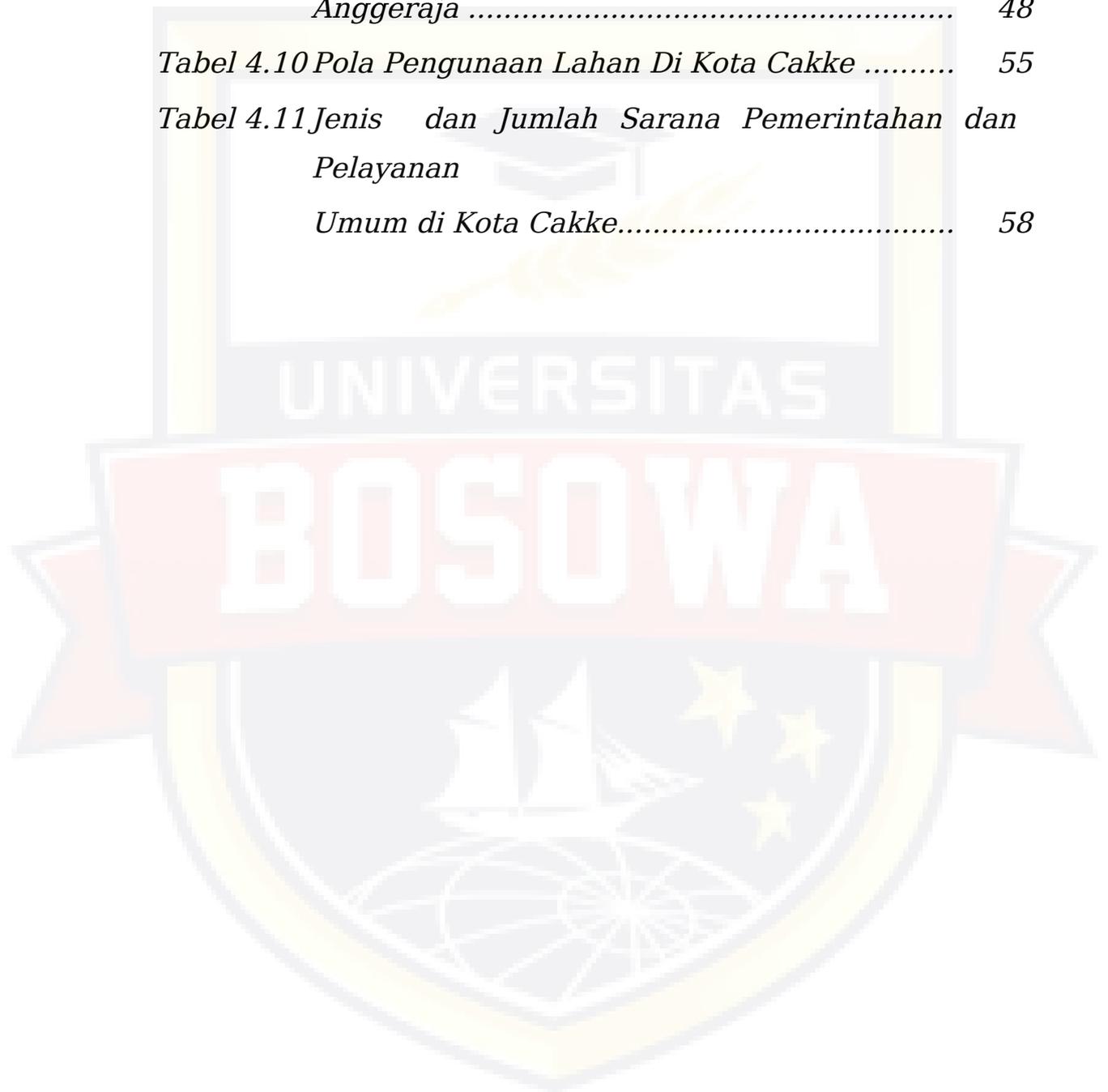
*Tabel 4.9 jinis Dan Jumlah Sarana Kesehatan di
Kecamatan*

Anggeraja 48

Tabel 4.10 Pola Penggunaan Lahan Di Kota Cakke 55

*Tabel 4.11 Jenis dan Jumlah Sarana Pemerintahan dan
Pelayanan*

Umum di Kota Cakke..... 58



<i>Tabel</i>	<i>4.12</i>	
	
	<i>jenis dan Jumlah sarana Perdagangan di Kota</i>	
	<i>Cakke</i>	<i>59</i>
<i>Tabel</i>	<i>4.13</i>	
	
	<i>jenis Dan Jumlah Sarana Pendidikan di Kota</i>	
	<i>Cakke</i>	<i>62</i>
<i>Tabel</i>	<i>4.14</i>	
	
	<i>Jenis dan JUmlah Sarana Tempat Peribadatan di</i>	
	<i>Kota</i>	
	<i>Cakke</i>	<i>63</i>
<i>Tabel 4.15</i>	<i>Jenis dan Jumlah Sarana Kesehatan di Kota</i>	
	<i>Cakke</i>	<i>65</i>
<i>Tabel</i>	<i>4.16</i>	
	
	<i>Pertumbuhan Jumlah Penduduk Kota Cakke</i>	
	<i>Tahun 2013-2017</i>	<i>68</i>
<i>Tabel</i>	<i>4.17</i>	
	
	<i>Kondisi Eksisting Sarana Kota Cakke</i>	<i>72</i>
<i>Tabel</i>	<i>4.18</i>	
	
	<i>Tingkat Ketersedian Sarana Perkotaan di Kota</i>	
	<i>Cakke</i>	<i>76</i>
<i>Tabel</i>	<i>4.19</i>	
	
	<i>Kebutuhan Sarana Tahun 2037</i>	<i>79</i>

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	Peta Administrasi Kabupaten Enrekang ...	37
Gambar 4.2	Peta Administrasi Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang	54
Gambar 4.3	Peta Penggunaan Lahan Kecamatan Anggeraja Kebupaten Enrekang.....	56
Gambar 4.4	Gambar Pasar Cakke	58
Gambar 4.5	Deretan Pertokoan Cakke	59
Gambar 4.6	PUAD (Taman Kanak Kanak)	60
Gambar 4.7	SD / Sekolah Dasar (Sarana Pendidikan) .	60
Gambar 4.8	SMP/ MTS/ SLTA (Sarana Pendidikan)	61
Gambar 4.9	SMA (Sarana Pendidikan)	61
Gambar	4.10 Masjid AL-Hadist (Sarana Peribadatan) ...	62
Gambar 4.11	Masjidt AL-Hamrah (Sarana Peribadatan)	63
Gambar	4.12 Puskesmas (sarana Kesehatan)	64
Gambar	4.13 Rumah Sakit Puang Sabbe (Sarana Kesehatan)	64

Gambar	4.14	
.....		
Posyandu (Sarana Kesehatan)		65
Gambar	4.15	
.....		
Peta Eksisting Sebaran Sarana Kecamatan Anggeraja		66
Gambar	4.16	
.....		
Peta Analisis Sebaran Sarana di Kecamatan Anggeraja		75
Gambar	4.17	
.....		
Peta Proyeksi Sebaran Sarana Di Kecamatan Anggeraja		81

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki penduduk paling banyak setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Tentunya memiliki berbagai konsekwensi yang lebih kompleks, apalagi jika dihubungkan dengan permasalahan pembangunan kota sebagai bentuk indikator dari kemajuan pembangunan itu sendiri. Melihat dari pengalaman yang telah terjadi dari beberapa waktu yang lalu, dapat dikemukakan bahwa sistem pembangunan di

Dunia umumnya dan khususnya pembangunan di Indonesia belum memiliki wawasan lingkungan yang baik dan perencanaannya masih belum memperhatikan keseimbangan ekologi, dan dalam hal ini ialah perencanaan kota yang memadai.

Kecenderungan perkembangan wilayah Indonesia yang dicirikan oleh tingkat pertumbuhan penduduk seperti halnya negara-negara berkembang lainnya berlangsung sangat pesat. Pertumbuhan penduduk yang sangat pesat ini mempunyai implikasi yaitu meningkatnya tuntutan permintaan atas pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya.

Perlu disadari bahwa banyaknya permasalahan yang dihadapi oleh daerah perkotaan maupun pedesaan, dimana ketersediaan dan tingkat pelayanan sarana dan prasarana masih terbatas dan belum secara merata dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, ini ditandai dengan meningkatnya konsentrasi lingkungan permukiman yang sering tidak diikuti dengan meningkatnya sarana dan prasarana penunjang permukiman. Sejalan dengan perkembangan tersebut maka pemerintah harus tanggap terhadap kebutuhan akan sarana dan prasarana khususnya untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

Masalah tersebut memang semakin sulit diatasi atau semakin menimbulkan permasalahan baru yang tidak kalah peliknya dalam mengelola pertumbuhan, perkembangan pembangunan dan pola kehidupan di kota-kota. Ini disebabkan karena pertumbuhan dan perkembangan penyediaan sarana dan prasarana selalu

lebih lambat dari pada tuntutan kebutuhan penduduk yang terus meningkat dan berjalan cepat.

Kabupaten Enrekang merupakan salah satu wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki tingkat perkembangan yang cukup pesat. Dalam 10 tahun terakhir (2007-2017) Kabupaten Enrekang mengalami pemekaran wilayah kecamatan, dari 5 kecamatan induk menjadi 12 wilayah kecamatan saat ini. Kondisi ini mengindikasikan deliniasi kawasan perkotaan akan mengalami perubahan secara mendasar. Pada awalnya deliniasi kawasan perkotaan terdiri atas 5 kota kecamatan dan 1 kabupaten, dengan terjadinya perubahan tersebut maka kondisi saat ini akan dengan sendirinya merubah kawasan perkotaan menjadi 12 kota kecamatan.

Munculnya kota-kota tersebut diharapkan dapat menjadi pusat pelayanan terhadap kawasan-kawasan sentra produksi disekitarnya, sehingga distribusi pelayanan sarana perkotaan dapat terpusat dan tidak lagi menjadi beban bagi kota kabupaten dan kota kecamatan induk. Akan tetapi untuk mengendalikan pembangunan kota-kota tersebut dan agar tidak lagi mengalami perubahan pemanfaatan lahan secara berlebihan yang dapat merusak fungsi lahan pertanian, maka diperlukan adanya batasan fungsi kota sebagai pusat pelayanan terhadap wilayah kecamatan masing-masing.

Kecamatan Anggeraja merupakan salah satu wilayah Kecamatan di Kabupaten Enrekang yang terletak pada ketinggian dari permukaan laut

500- 3.329 Meter yang terbentuk sejak awal tanpa melalui pemekaran wilayah. Bentangan wilayah Kecamatan Anggeraja meliputi daratan seluas 14.204 Ha dan mencakup 18 Desa/Kelurahan dengan pusat aktifitas perkotaan di Cakke Sebagai Ibu Kota Kecamatan. Dengan demikian Cakke memiliki fungsi dan peran sebagai pusat pelayanan terhadap seluruh wilayah Kecamatan Anggeraja. Untuk memberi peran yang optimal di Cakke sebagai Ibukota Kecamatan Anggeraja Sebagai pusat pelayanan maka perlu untuk mengkaji jenis dan jumlah sarana perkotaan yang dibutuhkan berdasarkan fungsi kota dan kebutuhan penduduk di dalamnya dan penduduk dari daerah hinterlandnya. Cakke Sebagai Ibu kota Kecamatan yang berada di Kabupaten Enrekang Blum maksimal pelayanannya jika dibandingkan dengan Ibu Kota Kecamatan Lainnya. Salah satu penyebabnya yaitu kurang optimalnya pelayanan sarana perkotaan yang ada Cakke. Masih kurangnya sarana kesehatan seperti apotik dan posyandu yang menjadi kebutuhan bagi penduduk lokal Kecamatan Anggeraja khususnya yang berada di Cakke. Sarana pemerintahan walaupun ketersediaannya sudah ada namun pelayanannya yang masih belum optimal.

Selain itu letak Cakke yang strategis yang merupakan simpul pertemuan jalur ke kecamatan lain yaitu jalur menuju ke Kecamatan Baraka dan Kecamatan Alla, oleh karena itu sangat perlu adanya peningkatan sarana yang mencirikan perkotaan pada Cakke dengan fungsinya sebagai pusat pelayanan. Pada dasarnya fungsi kota kecamatan terdiri atas dua fungsi dasar, yaitu sebagai pusat pelayanan terhadap penduduk seluruh wilayah kecamatan (fungsi

primer) dan sebagai pusat pelayanan lokal terhadap penduduk kota itu sendiri (fungsi komplementer). Terkait dengan hal itu kajian penelitian yang dilakukan untuk dapat memberi penegasan fungsi Cakke dalam bentuk penulisan dengan judul “ **Kebutuhan Sarana Perkotaan Di Cakke Sebagai Ibukota Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang**”.

B. RUMUSAN MASALAH

Dari uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana tingkat ketersediaan sarana perkotaan di Cakke yang dapat menunjang fungsinya sebagai Ibu Kota Kecamatan Anggeraja.
2. Bagaimana kebutuhan sarana perkotaan di Cakke berdasarkan peran dan fungsinya sebagai Ibu Kota Kecamatan.

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari studi penelitian ini berdasarkan rumusan masalah di atas adalah :

- a. Untuk mengetahui tingkat kebutuhan sarana di Cakke Sebagai ibu Kota Kecamatan untuk menunjang fungsinya sebagai pusat pelayanan terhadap Kecamatan Anggeraja.
- b. Untuk menentukan kebutuhan sarana perkotaan di Cakke. sehingga dapat menunjang fungsinya sebagai ibukota kecamatan Di Anggeraja.

2. Manfaat penelitian

Manfaat dari penulisan ini, dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi Kabupaten Enrekang dalam merumuskan Konsep Perencanaan Tata Ruang Cakke Sebagai Ibu Kota Kecamatan. Selain itu juga dapat menjadi acuan pada penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan tema penulisan ini.

D. RUANG LINGKUP PEMBAHASAN

1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini mencakup :

- a. Identifikasi terhadap peran dan fungsi Cakke dalam lingkup Kecamatan Anggeraja.
- b. Identifikasi terhadap ketersediaan sarana pelayanan yang terdapat di Cakke dari segi kualitas dan kuantitas namun lebih diprioritaskan pada kuantitasnya
- c. Identifikasi terhadap jumlah penduduk
- d. Identifikasi terhadap kebutuhan sarana perkotaan berdasarkan fungsi berdasarkan Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budi Daya (2007) dan disesuaikan dengan jumlah penduduk.

E. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

BAB I : Pendahuluan, Memberi gambaran tentang latar belakang penulisan, rumusan permasalahan, tujuan dan manfaat penulisan, pembahasan ruang lingkup pembahasan dan defenisi operasional serta sistematika pembahasan.

BAB II :Tinjauan Pustaka, berisikan tentang pengertian dan pemahaman kota, struktur pelayanan perkotaan, dan tinjauan tentang teori pengembangan kota, jenis dan jumlah sarana perkotaan untuk IKK (Ibu Kota Kecamatan).

BAB III: Metodologi Penelitian, menjelaskan tentang lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik dan pengumpulan data, metode analisa yang digunakan.

BAB IV :Hasil Dan Pembahasan, menguraikan tentang tinjauan umum wilayah kecamatan Anggeraja, karakteristik pengembangan Cakke, serta analisa ketersediaan sarana dan struktur pelayanannya.

BAB V: Penutup, menguraikan tentang kesimpulan dan saran.

TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN PUSTAKA

1. Wilayah Perkotaan

Kota (*city*) adalah wilayah perkotaan yang telah mempunyai status administrasi sebagai sebuah kota, baik kota kecil, kotamadya maupun kota metropolitan. Selanjutnya, Adisasmita (2006) juga menyatakan bahwa pada umumnya kota diartikan sebagai suatu wilayah dimana terdapat pemusatan (konsentrasi) penduduk dengan berbagai jenis kegiatan ekonomi, sosial, budaya, dan administrasi pemerintahan.

Dalam mengartikan atau mendefinisikan, kota adalah sangat relatif dan sulit, karena tergantung dari sudut pandang hukum, politik, sosial, ekonomi dan lain-lain, yang mempunyai pengertian yang berbeda-beda. Menurut Dickinson kota adalah suatu pemukiman yang bangunannya rapat, dan penduduknya bernafkah bukan petani. Terdapat juga pengertian bahwa suatu kota dicirikan oleh adanya prasarana dan sarana perkotaan, seperti bangunan yang besar bagi pemerintahan, rumah sakit, sekolah, pasar dan sebagainya, taman serta alun-alun yang luas dan jalanan aspal yang lebar-lebar. Dengan demikian kota menyediakan segala fasilitas bagi kehidupan baik sosial maupun ekonomi sehingga baik bertempat tinggal maupun bekerja dan berkreasi dapat dilakukan oleh penduduk di dalam kota

Secara lebih rinci dapat digambarkan bahwa suatu kota meliputi konsentrasi daerah pemukiman berpenduduk cukup besar dan dengan kepadatan yang relatif

tinggi dimana kegiatan penduduk didominasi oleh kegiatan nonpertanian, seperti industri, perdagangan dan jasa, baik di bidang keuangan, transportasi, pendidikan, kesehatan dan pariwisata. Pembangunan ruang perkotaan bertujuan untuk: (1) memenuhi kebutuhan masyarakat akan tempat berusaha dan tempat tinggal, baik dalam kualitas maupun kuantitas dan (2) memenuhi kebutuhan akan suasana kehidupan yang memberikan rasa aman, damai, tenteram, dan sejahtera.

Pembangunan kota harus diupayakan untuk lebih meningkatkan produktifitas yang dapat mendorong sektor-sektor perekonomian, akan tetapi pengembangannya perlu memperhatikan ketersediaan sumberdaya, agar pemanfaatan sumberdaya untuk pelayanan sarana dan prasarana kota lebih efisien. Pembangunan perkotaan dilaksanakan dengan mengacu pada pengembangan investasi yang berwawasan lingkungan, sehingga tidak membawa dampak negatif terhadap lingkungan dan tidak merusak kekayaan budaya daerah. Hal tersebut juga diperlukan agar tercipta keadilan yang tercermin pada pemerataan kemudahan dalam memperoleh penghidupan perkotaan, baik dari segi prasarana dan sarana maupun dari lapangan pekerjaan.

Dari berbagai pengertian definisi tentang kota tersebut, baik dari aspek fisik, fungsional, perundang-undangan maupun dari aspek sosial ekonomi namun kenyataan bahwa eksistensi suatu kota mempunyai unsur-unsur yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan, dimana unsur-unsur perbedaan suatu kota ini merupakan unsur utama pembentuk kota.

2. Pengembangan Kota

Tujuan pengembangan kota adalah pembangunan kota itu sendiri dalam arti bahwa kondisi kota menjadi lebih baik di segala sektor; yang meliputi sektor jasa dan pertanian (paling tidak pengelolaan hasil pertanian dan dari segi pendapatan masyarakat atau segi pengeluaran konsumsi, investasi dan pemerintah daerah serta ekspor impornya. Selanjutnya diharapkan agar kegiatan perekonomian kota itu membuka kesempatan kerja lebih banyak, sehingga tercapailah pemerataan di segala bidang dalam kehidupan kota. Disamping tujuan di atas ada tujuan lain dari pengembangan kota, yaitu agar kegiatan kota dan daerah sekitarnya itu seimbang. Dengan perkataan lain kota hendaknya berkembang dalam fungsinya sebagai tempat pelayanan warga kota dan daerah sekitarnya.

Untuk pencapaian tujuan-tujuan tersebut tentu saja perlu diadakan evaluasi tentang kekuatan serta kelemahan kota, baik itu sektor swasta maupun pemerintah dalam segi-segi atau aspek lahan, lokasi, kesempatan kerja, permukiman, angkutan kota keuangan dan lain-lain. Hal-hal yang positif kiranya akan dapat membantu memperlancar tercapainya tujuan-tujuan, karena penduduk memusatkan perhatian pada kegiatan-kegiatan untuk memperbaiki hal-hal yang kurang atau negatif terlebih dahulu.

Dengan melihat pada keadaan dan situasi lingkungan, baik itu intern maupun ekstern kota, dapatlah ditentukan posisi kota. Yang dimaksud lingkungan disini adalah situasi politik, ekonomi, sosial, budaya, agama, teknologi, pertahanan dan keamanan dalam kota

maupun daerah diluar kota baik sekarang maupun yang akan datang. Dengan demikian dapatlah ditentukan seberapa besar celah / kesenjangan yang perlu diisi dengan tindakan-tindakan positif, yaitu paling tidak mendekati situasi sekarang dengan tujuan yang ingin di capai.

Unsur ruang suatu kota yang pada hakekatnya akan mempunyai fungsi primer dan sekunder adalah terdiri dari unsur ruang pokok dan unsur ruang penunjang. Dimana pada kawasan primer akan terkait pada kepentingan sebagai simpul jasa dan distribusi, sedangkan ruang penunjang berupa sarana dan prasarana pendukung berbagai lingkungan yang diperlukan dalam peranannya sebagai fungsi primer.

Menurut Sinulingga, sebuah kota berfungsi sebagai pusat pengembangan (Growth Center) dari wilayah pengaruhnya (hinterland). Bila kondisi suatu kota mempunyai syarat seperti diatas maka akan menyebabkan berkembangnya tiga hal yaitu :

- a. Ajang jasa (ajang niaga) akan berkembang secara wajar di seluruh wilayah
- b. Kawasan-kawasan berbentuk lingkaran yang saling berbatasan akan mempunyai bagian-bagian yang bertumpang tindih atau bagian yang senjang
- c. Dalam wilayah akan berkembang ajang niaga dalam pola hexagon.
- d. Dalam kehidupan masyarakat perkotaan yang dinamis, maka fungsi utama Kota sekurang-kurangnya ada 4 yaitu :

- Tempat Tinggal (Wisma)

Perumahan (papan) merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia disamping kebutuhan makanan (pangan) dan kebutuhan pakaian (sandang).

- Tempat Kerja (Karya)

Kota sebagai pusat kegiatan dapat ditandai dengan terjadinya aglomerasi industri dan arus urbanisasi. Kegiatan tersebut meliputi kegiatan-kegiatan di bidang pemerintahan, perindustrian, perdagangan, perbankan, pendidikan, kesehatan, sosial budaya, keagamaan dan sebagainya. Kegiatan-kegiatan tersebut makin berkembang, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, untuk itu perlu diberikan perhatian dan pengelolaan yang wajar serta memadai, agar pertumbuhan dan perkembangan kota dapat berlangsung secara wajar.

- Fungsi lalu lintas (Marga)

Permukiman penduduk yang terpusat di daerah perkotaan menimbulkan kebutuhan akan sarana dan prasarana transportasi yang digunakan untuk melayani angkutan penduduk. Secara teoritis permintaan akan jasa transportasi adalah bersifat turunan (derived demand)

- Fungsi Rekreasi (suka)

Prestasi kerja dipengaruhi oleh banyak faktor, misalnya tingkat pendidikan, pendapatan, kesehatan, perumahan, kebiasaan dan rekreasi. Dengan cukup tersedianya lokasi rekreasi diharapkan

penduduk di daerah perkotaan dapat menyegarkan kembali keadaan jasmani dan rohaninya, serta menimbulkan semangat dan menambah gairah kerja, yang selanjutnya diharapkan produktifitas kerja dapat di tingkatkan.

3. Sarana dan Prasarana perkotaan

Prasarana dan sarana (*infrastructure*) sering diartikan sebagai bangunan fisik untuk kesejahteraan dan keselamatan umum (seperti jalan, pelabuhan, bandara, tenaga listrik, telekomunikasi, irigasi, air bersih, dan sanitasi), merupakan prasyarat agar berbagai aktivitas masyarakat dapat berlangsung. Infrastruktur memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan bahkan sosial-politik (seperti diindikasikan oleh daerah yang mempunyai kelengkapan sistem infrastruktur yang lebih baik dan stabilitas sosial politik yang mantap).

Sarana dan prasarana dalam istilah umumnya dipakai untuk menunjuk kepada suatu unsur penting dalam -set pemerintah atau pemberian jasa pelayanan pada umumnya; jaringan dan atau bangunan-bangunan yang memberikan pelayanan dengan fungsi tertentu kepada masyarakat maupun perorangan berupa kemudahan kehidupan masyarakat dan pemerintah, menunjang kebutuhan masyarakat, di perkotaan lebih rumit dan di luar Kota lebih langka, misalnya bangunan-bangunan kesehatan, peribadatan, pendidikan pemerintahan, sarana pendidikan dan sebagainya.

Disamping kebutuhan akan Sarana dan prasarana, dalam suatu lingkungan baik itu lingkungan perumahan dan permukiman maupun suatu lingkungan

perkotaan harus dilengkapi pula dengan ketersediaan sarana, yang mana sarana tersebut dapat menunjang kelangsungan hidup masyarakat dan perkembangan kota itu sendiri. Adapun sarana yang kurang lebihnya harus dimiliki oleh suatu lingkungan mencakup; sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana perbelanjaan dan niaga (perdagangan), sarana pemerintahan dan pelayanan umum, tempat peribadatan, tempat rekreasi dan kebudayaan, serta sarana olah raga dan lapangan terbuka. Sarana tersebut diatas sudah sesuai dengan standar yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum (DPU).

Ketersediaan sarana dan prasarana bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan sarana dan prasarana lingkungan baik yang berada di kawasan perkotaan maupun kawasan pedesaan; peningkatan peranan dunia usaha/swasta dalam penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan; meningkatkan penataan, pemanfaatan dan pengelolaan kawasan strategis; meningkatkan pemugaran dan pelestarian kawasan bersejarah dan kawasan tradisional; meningkatkan keamanan dan keselamatan bangunan. Sasaran program ini adalah meningkatnya derajat kesejahteraan dan kesehatan masyarakat; meningkatnya kemudahan bagi masyarakat dalam mendapatkan pelayanan sarana dan prasarana permukiman; meningkatkan investasi swasta secara nyata dalam pembiayaan sarana dan prasarana permukiman; meningkatnya peranan kawasan strategis, kawasan bersejarah dan kawasan tradisional.

4. Sarana Lingkungan Perkotaan

Adapun standar sarana yang di pergunakan di dalam penyusunan laporan ini sesuai dengan konsep Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budi Daya (2007) serta disesuaikan dengan keinginan masyarakat lokasi studi dan tidak terlepas dari arahan Rencana Detail Tata Ruang Kota

Untuk menunjang kehidupan sehari-hari dan guna menciptakan suatu lingkungan permukiman yang baik di perkotaan, maka perlu ditunjang dengan berbagai sarana. Dalam perencanaan permukiman asumsi dasar dalam pembangunan permukiman diperlukan dalam menghitung kebutuhan sarana yang didasarkan pada pola penduduk

Sarana merupakan fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya dan ekonomi. Menurut onyers, D. dan P. Hills (1984) sarana/fasilitas permukiman pada perkotaan dapat meliputi diantaranya yaitu Fasilitas Ekonomi dan Fasilitas Sosial.

- Sarana/fasilitas ekonomi/komersial yang ada pada umumnya milik dan dikelola sektor swasta atau perusahaan negara atau perusahaan daerah, adala sarana yang disediakan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi suatu desa seperti pabrik, pasar, bank dan lain-lain
- Fasilitas sosial yang pada umumnya dimiliki dan dikelola oleh pemerintah adalah sarana yang disediakan untuk kepentingan umum, yang pada umumnya meliputi sosial dan pelayanan masyarakat.

5. Fasilitas Sarana Perkotaan

Sarana merupakan fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya dan ekonomi;

a. Fasilitas Pendidikan;

Pengertian pendidikan menurut Sistem Pendidikan Nasional adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan pelatihan bagi peranannya dimasa yang akan datang. Fasilitas sosial seperti yang telah dijelaskan sebelumnya merupakan suatu aktivitas atau materi yang melayani masyarakat akan kebutuhan yang bersifat memberi kepuasan sosial, mental maupun spritual. Sehingga dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan kebutuhan masyarakat akan kebutuhan yang bersifat memberi kepuasan sosial, mental maupun spiritual melalui kegiatan bimbingan, pengajaran maupun pelatihan

Sarana pendidikan harus bertitik tolak dari tujuan-tujuan pendidikan yang akan dicapai. Sarana pendidikan berupa ruang belajar, dan luasan bangunan masing-masing kelas yang akan dibangun. Kebutuhan ruang belajar ditentukan berdasarkan kebutuhan untuk memberi kesempatan belajar kepada semua anak usia sekolah.

1). Taman Kanak-Kanak

Taman kanak-kanak adalah sarana pendidikan paling dasar yang diperuntukkan bagi anak-anak usia 5 - 6 tahun yang terdiri dari 2 ruang kelas yang dapat menampung 35 - 40 murid. Yang dilengkapi dengan

ruang-ruang pelengkap lainnya. Jumlah penduduk yang dapat mendukung sarana ini adalah 1.250 jiwa dengan luas lahan yang dibutuhkan adalah 500 m^2 .

2). Sekolah Dasar (SD)

Sekolah dasar diperuntukkan bagi anak-anak usia 6 - 12 tahun yang terdiri dari 6 kelas masing-masing untuk 40 murid. Jumlah penduduk pendukung untuk fasilitas ini adalah 1.600 jiwa dengan radius pencapaian dari area yang dilayani maksimum 2.000 m^2 .

3). Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)

Sekolah lanjutan tingkat pertama adalah sekolah untuk melayani anak-anak lulusan SD. Dimana 3 SD dilayani oleh sebuah SLTP, yang terdiri dari 2 unit, jadi 6 kelas masing-masing untuk 30 murid. Jumlah penduduk pendukung untuk fasilitas ini sebesar 4.800 jiwa dengan luas lahan yang dipakai 9.000 m^2 .

4). Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)

Sekolah lanjutan tingkat atas adalah sekolah untuk murid usia 14 - 18 tahun dimana 1 SLTP sebaiknya dilayani oleh 1 SLTA yang terdiri dari 6 kelas, masing-masing untuk 30 murid.

Jumlah penduduk pendukung untuk fasilitas ini adalah 4.800 jiwa dengan luas lantai 72 m^2 luas lahan 12.500 m^2 . Dengan sarana

pelengkap seperti parkir, lapangan olahraga dan fasilitas pendukung

lainnya. Kebutuhan sarana ini secara umum dapat dinyatakan pada table.

2.1.

Tabel 2.1
Standar Kebutuhan Berdasarkan
Penduduk
Untuk Sarana Pendidikan

No	Jenis Sarana	Jumlah penduduk pendukung (jiwa)	Kebutuhan per satuan sarana		Standar (m ² /jiwa)	Kriteria	
			Luas lantai min (m ²)	Luas lahan min (m ²)		Radius pencapaian (jiwa)	Lokasi dan penyelesaian
1.	TK	1.250	216	500	0,28	500	Ditengah kelompok keluarga. Tidak menyeberang jalan raya. Bergabung dengan taman sehingga terjadi pengelompokan kegiatan.
2.	SD	1.600	633	2.000	1,25	1.000	
3.	SLTP	4.800	2.282	9.000	1,88	1.000	Dapat dijangkau dengan
4.	SLTA	4.800	3.835	12.500	2,6	3.000	kendaraan umum, Disatukan dengan lapangan olah raga. Tidak selalu harus di pusat lingkungan
	Taman						Ditengah kelompok warga. Tidak menyeberang jalan lingkungan.

5.	Baca	2.500	72	150	0,09	1.000	
----	------	-------	----	-----	------	-------	--

Sumber : Standar Kebutuhan Ruang Dept. PU Tahun 2017

b. Sarana Kesehatan

Fasilitas kesehatan merupakan fasilitas yang memberikan pelayanan di bidang kesehatan yang berupa (Sarjito,1983, dalam Mahmud R,1997:30) : Kuratif yaitu pemeriksaan, pengobatan dan perawatan. Preventif yaitu pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan dan pendidikan kesehatan.

Kesehatan Lingkungan

Sarana kesehatan bukan saja penting untuk kesehatan penduduk, melainkan berfungsi pula untuk mengendalikan perkembangan/pertumbuhan penduduk, Sesuai dengan standar tingkat kebutuhan fasilitas kesehatan yang harus termuat dalam suatu permukiman adalah sebagai berikut;

1). Balai Pengobatan Warga

Fungsi utama balai pengobatan adalah memberikan pelayanan kepada penduduk di bidang kesehatan. Jumlah penduduk yang dapat mendukung sarana ini adalah 2.500 jiwa dengan luas lahan 300 m².

2). BKIA + Klinik Bersalin

Fungsi utama dari sarana ini adalah untuk melayani ibu-ibu sebelum, pada waktu dan sesudah melahirkan serta melayani anak-anak usia s/d 6

tahun. Dengan radius pencapaian maksimum 2000 jiwa dan jumlah penduduk yang dapat mendukung sarana ini adalah minimum 30.000

jiwa dengan luas lahan 1.000 m².

3). Puskesmas Pembantu Dan Balai Pengobatan Lingkungan

Fungsi utama dari sarana ini adalah memberikan pelayanan kepada penduduk di bidang kesehatan (penyembuhan, pencegahan, dan pendidikan) juga sebagai organ terkecil dari Departemen Kesehatan untuk memantau seluruh kesehatan lingkungan.

Jumlah penduduk yang dapat mendukung sarana ini adalah 30.000

jiwa dengan lahan 300 m² dengan fasilitas pendukungnya seperti tempat parkir, pelayanan pemerintahan dan sosial lainnya, gedung serba guna

dan apotik.

4). Posyandu

Jumlah penduduk pendukung adalah 1.250 jiwa dengan luas lahan 60 m². Sebagai wahana pelaksanaan kegiatan-kegiatan penyuluhan

kesehatan seperti pemberian vaksin bagi anak-anak.

5). Apotik/Rumah Obat

Fungsi utama dari sarana ini adalah untuk melayani penduduk di dalam bidang obat-obatan, jumlah penduduk pendukung sarana ini

adalah 30.000 jiwa dengan luas lahan 250 m².

6). Tempat Praktek Dokter

Tempat praktek dokter sebaiknya merupakan salah satu sarana yang tidak dapat dipisahkan dari area perumahan dan didukung oleh 5.000 jiwa. Luas tanah yang dibutuhkan dapat bersatu dengan rumah tinggal biasa. Kebutuhan sarana ini secara umum dapat dinyatakan pada tabel 2.2.

Tabel 2.2

**Standar Kebutuhan Berdasarkan
Penduduk
Untuk Sarana Kesehatan Tahun**

2016

No	Jenis Sarana	Jumlah penduduk pendukung (jiwa)	Kebutuhan per satuan sarana		Standar (m ² /jiwa)	Kriteria	
			Luas lantai min (m ²)	Luas lahan min (m ²)		Radius pencapaian (jiwa)	Lokasi, dan Penyelesaian
	Posyandu						-ditengah Kelompok tetangga

1.		1.250	36	60	0,048	500	- tidak menyeberang jalan raya
2.	Balai pengobatan warga	2.500	150	300	0,12	1.000	- di tengah kelompok tetangga - tidak menyeberang jalan raya
3.	BKIA / Klinik Bersalin	30.000	1.500	3.000	0,1	4.000	Dapat dijangkau Dengan kendaraan umum
4.	Puskesmas Pembantu dan Balai pengobatan Lingkungan	30.000	150	300	0,006	1.500	Dapat dijangkau dengan kendaraan umum
5.	Puskesmas dan Balai Pengobatan	120.000	420	1000	0,008	3.000	Dapat dijangkau dengankendaraan umum
6.	Tempat Praktek Dokter	5000	18	-	-	1.500	Dapat Dijangkau dengan kendaraan umum
	Apotik / Rumah Obat	30.000	120	250	0,025	1.500	Dapat dijangkau dengan kendaraan umum

7.							
----	--	--	--	--	--	--	--

Sumber : *Standar Kebutuhan Ruang Dept. PU Tahun 2017*

c. sarana peribadatan

Sarana peribadatan ini jenis, macam dan besaran sangat tergantung dari kondisi setempat. Untuk mendapatkan hasil yang sesuai perlu dilakukan survey setempat tentang;

- Struktur penduduk menurut umur dan eniskelamin
- Jenis agama/kepercayaan yang dianut masyarakat
- Cara atau pola melaksanakan agama/kepercayaan

Untuk agama Islam dan Kristen luas lantai bruto per jamaah adalah $1,2 \text{ M}^2$, dan tergantung pada peraturan bangunan setempat. Patokan untuk

kebutuhan sarana peribadatan bagi agama Islam adalah sebagai berikut a.

Kelompok penduduk pendukung 2.500 1 langgar dengan luas lahan 300 m^2 .

- Kelompok penduduk pendukung 30.000, 1 mesjid dengan luas lahan 1.750 m².
- Kelompok penduduk pendukung 120.000 1 mesjid, dengan luas lahan yang dibutuhkan adalah 4.000 m².

d. Sarana Perdagangan

Fasilitas perdagangan atau perbelanjaan merupakan fasilitas di mana tempat terjadinya transaksi ekonomi antara penjual dan pembeli yang berfungsi sebagai tempat pelayanan atas barang yang dibutuhkan oleh masyarakat. Fasilitas peribadatan;

- Toko/Warung

Fungsi utama toko adalah menjual barang-barang keperluan sehari-hari (sabun, gula, teh, rempah-rempah, dan lain-lain) minimum penduduk pendukung untuk sarana ini adalah 200 jiwa dengan radius pencapaian maksimum 100 m² (bila berdiri sendiri).

- Pertokoan

Pertokoan dengan fungsi utama adalah menjual barang-barang keperluan sehari-hari berupa toko-toko keperluan sehari-hari dan dapur. Minimum penduduk pendukung untuk sarana ini adalah 6.000 jiwa. Radius pencapaian menyebar pada masing-masing lingkungan dengan luas lahan yang diperlukan 3.000 m² dengan fasilitas pendukung lainnya seperti tempat parkir, pos penjagaan dan lainnya.

- Pusat pertokoan + Pasar Lingkungan

Fungsi utama sarana ini adalah tidak jauh berbeda dengan toko dan pertokoan, yang menjual barang-barang keperluan sehari-hari, termasuk sayur, daging, ikan, buah-buahan beras dan lain-lain. Penduduk pendukung untuk fasilitas ini adalah 30.000 jiwa, luas tanah yang dibutuhkan adalah 10.000 m² dengan fasilitas pendukung lainnya seperti tempat parkir terminal kecil, toko-toko, pos polisi, dan kantor.

- Pusat Perbelanjaan dan Niaga kecamatan (toko + pasar + bank + kantor)

Fungsi utama sama dengan pasar dan pertokoan lainnya, hanya kelengkapan fasilitas lebih besar skala pelayanannya. Penduduk pendukung untuk sarana ini adalah 120.000 jiwa dengan luas lahan yang dibutuhkan adalah 36.000 m² dengan dilengkapi oleh fasilitas pendukung lainnya seperti tempat parkir umum, pos polisi, pos pemadam kebakaran, kantor dan tempat ibadah.

e. Sarana ruang terbuka, Taman / Tempat Bermain / olah raga

Disamping fungsi utama sebagai taman, tempat bermain anak-anak dan lapangan olahraga juga akan memberikan kesegaran pada kota (cahaya dan udara segar). Dan netralisasi polusi udara sebagai paru-paru kota. Oleh karena itu fungsinya sangat penting untuk dijaga baik dalam besaran maupun kondisinya.

- Taman untuk kelompok 250 jiwa

Setiap kelompok 250 jiwa terdapat 1 unit taman. Fungsi utama taman tersebut adalah sebagai tempat bermain bagi anak-anak, sehingga lokasinya diusahakan penempatannya pada pusat-pusat lingkungan perumahan dengan luas lahan 250 m².

- Taman untuk kelompok 2.500 jiwa penduduk

Untuk setiap kelompok 2.500 jiwa penduduk dibutuhkan 1 unit taman yang ukurannya lebih luas dari taman untuk kelompok 1.250 m² jiwa.

Taman ini selain berfungsi sebagai tempat bermain anak-anak juga dapat difungsikan sebagai tempat berolahraga.

- Taman dan lapangan olahraga untuk kelompok 30.000 jiwa penduduk dengan luas lahan 9000 m².
- Taman dan lapangan olahraga untuk kelompok 120.000 jiwa penduduk dengan luas lahan 24.000 m².
- Jalur hijau
- Kuburan/pemakaman umum untuk kelompok 120.000 jiwa penduduk dengan luas lahan yang dibutuhkan 2000 M²

f. Sarana Kebudayaan dan Rekreasi

Sarana kebudayaan dan rekreasi, yang dimaksud dengan sarana- sarana ini adalah bangunan yang diperuntukkan bagi aktivitas-aktivitas kebudayaan dan atau rekreasi seperti gedung pertemuan, gedung serba guna, bioskop, gedung kesenian dan

lain-lain. Jenis sarana ini tergantung dari tata kehidupan penduduknya dan struktur sosial penduduknya. Sehingga didalam memilih jenis dan macam sarana ini perlu ada penyesuaian dengan kondisi dan situasi setempat. Kebutuhan sarana ini secara umum dapat dinyatakan sebagai berikut :

- Kawasan 30.000 jiwa penduduk (lingkungan)

Luas lahan yang digunakan untuk Gedung Serbaguna adalah 1.000 m², dan gedung Bioskop 2.000 m². Kebutuhan sarana ini secara umum adalah : Jumlah penduduk minimum 2.500 jiwa, dengan luas lahan adalah 3.000 m².

- Kawasan 120.000 jiwa penduduk (Kecamatan)

Kebutuhan akan lahan yang diperuntukan bagi sarana gedung serba guna adalah 3.000 m²

g. Pemerintahan dan Pelayanan Umum

Sistem pemerintahan, pelayanan umum, yang dimaksud dengan sarana-sarana tersebut adalah:

- Kantor-kantor administrasi pemerintahan (eksekutif, legislatif, yudikatif)
- Kantor pemerintahan lainnya seperti kantor polisi, kantor pos, telepon, PDAM dan lainnya yang berhubungan dengan tata pemerintahan.

Kebutuhan akan sarana tersebut untuk setiap tingkatan kelompok penduduk dan luas lahannya adalah sebagai berikut :

- a). Kawasan 2.500 penduduk

Kebutuhan akan sarana adalah pos hansip + balai pertemuan + Bis surat dengan luas lahan yang dibutuhkan adalah 300 M² dan parkir umum serta MCK dengan luas lahan 100 M².

b). Kawasan 30.000 penduduk

Kebutuhan akan sarana adalah kantor lingkungan 500 M² pos polisi 200 M² kantor pos pembantu dengan luas lahan 100 M², pos pemadam kebakaran 200 M², parkir umum+ MCK 1.000 M², dan bioskop dengan luas lahan 2.000 M².

c). Kawasan 120.000 Penduduk

Kebutuhan sarana yang ada didalamnya adalah kantor kecamatan, 1.000 M², Kantor polisi, 300 M², Kantor Pos Cabang, 500 M², Kantor Telepon, 300 M², Pos pemadam kebakaran 300 M², Parkir Umum, 4.000 M².

6. Kebutuhan

Dalam mempertahankan hidup sebagai perseorangan dan sebagai kelompok secara naluri, manusia mempunyai kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan seseorang harus dipenuhi untuk mempertahankan hidupnya, dan keinginannya dapat dipenuhi untuk pemuasan hasratnya.

Menurut Kamus Tata Ruang (1998), kebutuhan adalah suatu tingkat minimum yang harus dipenuhi sebagai syarat bagi individu atau masyarakat untuk hidup secara layak. Dari defenisi tersebut dapat ditarik kesimpulan, bahwa kebutuhan merupakan hal yang sangat penting untuk dilaksanakan dalam menjamin kelangsungan suatu aktivitas yang di jalankan setiap saat, sehingga kebutuhan akan sarana permukiman perlu dipenuhi untuk menunjang kegiatan masyarakat sehari-hari dan demi mempertahankan kelangsungan hidup.

7. Penentuan Lokasi Kegiatan di Daerah Perkotaan

Menurut Adisasmita, analisa lokasi sebagai jenis kegiatan di kawasan perkotaan dan struktur spatial kota tidak dapat dilepaskan dari masalah pentingnya penghematan ekstern dan penghematan aglomerasi serta biaya transportasi. Penghematan ekstern meliputi kemudahan untuk pasar tenaga kerja, manfaat yang diperoleh dari kontak pribadi dan penyediaan jasa perdagangan, kemudahan dalam hal potensi penduduk dan pasar, faktor lingkungan dan pengaruh daerah sekitarnya, sedangkan penghematan aglomeration meliputi skala ekonomi pada perusahaan atau tingkat industry

a). Lokasi Tempat Tinggal

Pemilihan lokasi untuk perumahan sangat penting untuk diperhatikan, dimana daerah kota yang digunakan untuk perumahan yang merupakan bagian terbesar. Menurut Adisasmita ada dua jenis model lokasi rumah tangga yaitu :

- Faktor yang menjadi pertimbangan utama dalam penentuan lokasi adalah biaya perjalanan ke tempat kerja, hal ini berarti penentuan lokasi permukiman berpedoman pada minimalisasi biaya perjalanan atau lebih mengacu pada sektor ekonomi.
- Pendekatan yang kedua terdiri dari teori-teori yang menekankan pemilihan lokasi rumah, pemilihan daerah dan pemilihan lingkungan sebagai penentu utama lokasi permukiman.

b). Lokasi Perkantoran

Lokasi perkantoran pada umumnya berada pada pusat kota. Suatu peningkatan besarnya kota diasosiasikan dalam suatu peningkatan yang lebih besar dalam tata ruang kantor. Hal ini disebabkan karena kota besar melaksanakan sejumlah fungsi yang regional, nasional dan internasional dan sebagian lagi karena sektor jasa pada umumnya serta lapangan kerja perkantoran pada khususnya berkembang pula. Lokasi pada pusat kota memberikan manfaat penghematan ekstern. Penghematan ini merupakan penghematan yang sangat penting bagi berbagai macam jenis kantor, profesi perbankan maupun asuransi.

c). Lokasi Perdagangan

Besar dan macam fasilitas perkotaan pada suatu lokasi tertentu merupakan daya tarik yang penting. Aglomerasi adalah lebih efisien karena biaya perjalanan dan waktu bagi para pembeli dan langganan dapat diminimalkan. Sedangkan toko yang menjual barang kebutuhan sehari-hari memilih lokasi yang mendekati pembeli langganannya. Ada gejala bahwa suatu toko yang ada sekarang pindah dari pusat Kota dan lebih suka berkelompok mendekati toko - toko di daerah perkotaan pada sub urban meskipun mendekati saingan – saingannya.

BOSOWA



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian dilakukan pada minggu pertama bulan April sampai minggu keempat bulan Juni tahun 2017. Penelitian yang dilakukan merupakan kajian terhadap penyediaan sarana perkotaan di Cakke sebagai pusat pelayanan terhadap Kecamatan Anggeraja. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan dengan beberapa pertimbangan, antara lain :

1. Kecamatan Anggeraja merupakan wilayah kecamatan yang terbentuk sejak awal terbentuknya Kabupaten Enrekang tanpa melalui pemekaran wilayah sehingga dapat menjadi pertimbangan bagi wilayah Kecamatan lain dalam hal pengelolaan penyediaan sarana perkotaan
2. Kecamatan Anggeraja merupakan simpul pertemuan jalur ke Kecamatan lain yaitu Kecamatan Alla dan Kecamatan Baraka, maka dari itu perlu adanya penegasan fungsi Cakke sebagai pusat pelayanan dalam hal pemenuhan keebutuhan sarana perkotaan wilayah Kecamatan.

3. Dengan berbagai faktor tersebut, maka dipandang perlu mengkaji sistem pelayanan sarana perkotaan di Cakke sehingga penduduk di Cakke dapat memperoleh pelayanan dalam lingkup wilayah sendiri, berdasarkan potensi yang dimiliki.

B. Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilakukan 3 bulan, yang dimulai dari minggu pertama bulan Oktober 2016 sampai minggu keempat November 2016 . Pengumpulan data dilaksanakan pada minggu pertama bulan Oktober 2016 sampai minggu Kedua bulan Oktober 2016. Survey lapangan dilaksanakan pada minggu kedua bulan Oktober 2016 sampai minggu keempat bulan November 2016 . Analisis Data dilaksanakan pada, minggu kedua bulan November 2016 sampai minggu ketiga bulan Desember 2016. Pembuatan laporan dilaksanakan pada minggu keempat bulan Januari 2017 hingga minggu keempat bulan Maret 2017. Seminar hasil dilaksanakan pada minggu ke dua bulan Maret 2017.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan terdiri atas dua macam, yaitu data kuantitatif. Uraian jenis data yang digunakan antara lain : data kuantitatif yaitu data yang menjelaskan

lokasi penelitian dalam bentuk angka-angka seperti jumlah penduduk, jumlah sarana dan lain sebagainya

2. Sumber Data

Sumber data merupakan data yang diperoleh menurut teknik pengumpulan yang dilakukan, sumber data yang digunakan terdiri atas :

- Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui survey dan pengamatan lapangan di lokasi penelitian, data ini meliputi: pola penggunaan lahan, kondisi fisik lahan, penyebaran sarana, dan lain sebagainya.
- Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui telaah pustaka berupa dokumen-dokumen yang berkenaan dengan lokasi penelitian atau data yang bersumber dari instansi pemerintahan, Kantor Kecamatan setempat, data BPS. Data ini antara lain berupa jumlah dan struktur kependudukan, jumlah sarana, arahan pengembangan kota, luas penggunaan lahan, dan lain sebagainya

D. Metode Pengumpulan Data

Tahap pengumpulan data bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi yang ada pada lokasi

penelitian. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara :

- Metode observasi lapangan, yaitu cara pengumpulan data secara langsung kelapangan dengan melakukan proses pengamatan dan pengambilan data atau informasi terhadap aspek-aspek yang berkaitan dengan penelitian.
- Metode telaah pustaka, yaitu cara pengumpulan data dengan menggunakan sumber-sumber documenter berupa literatur, laporan penelitian serupa, bahan seminar dan jurnal.

E. Metode Analisis

Metode Analisis yang digunakan berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, antara lain :

1. Analisis Skoring

Analisis ini digunakan untuk mengkaji rumusan masalah yang pertama yaitu Untuk mengetahui tingkat ketersediaan sarana di Cakke untuk menunjang fungsinya sebagai pusat pelayanan terhadap Kecamatan Anggeraja. Tingkat ketersediaan dinilai berdasarkan standardisasi kebutuhan sarana perkotaan skala Kecamatan berdasarkan Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budi Daya, dengan memberikan bobot pada masing-masing sarana berdasarkan tingkat ketersediaannya di Cakke.

Sehingga fungsi Cakke sebagai pusat pelayanan terhadap wilayah Kota sendiri dan daerah hinterlandnya dapat dioptimalkan melalui ketersediaan kelengkapan sarana perkotaan.

Penilaian untuk sarana perkotaan dilakukan dengan 3 kategori penilaian. Adapun kategori penilaian sebagai berikut :

- a. Baik = 5 (jika memiliki tingkat ketersediaan 75%-100%)
- b. Cukup = 3 (jika memiliki tingkat ketersediaan 50%-74%)
- c. Kurang = 1 (jika memiliki tingkat ketersediaan 50 %)

Penilaian untuk mengetahui tingkat ketersediaan sarana perkotaan dilakukan dengan melihat masing-masing sarana yang dilakukan dengan pengskoringan nilai bobot masing-masing sarana dengan penilaian sebagai berikut :

- a. 75% - 100% = tersedia, jika sarana perkotaan dapat memenuhi kebutuhan penduduk dan sesuai dengan standar yang dikeluarkan Dinas PU.
- b. 50% - 74% = cukup, jika sarana perkotaan yang terdapat di Cakke tidak sepenuhnya memenuhi

kebutuhan penduduk atau jumlah sarana yang ada belum cukup untuk memenuhi kebutuhan penduduk.

c. 50% = dikatakan kurang atau tidak tersedia jika sarana yang ada sama sekali tidak mampu memberikan pelayanan bagi penduduk atau bahkan tidak tersedia di lokasi.

2. Analisis Kebutuhan Sarana Perkotaan di Cakke

Analisis ini digunakan untuk mengetahui jumlah dan jenis sarana perkotaan yang dibutuhkan Cakke berdasarkan fungsi Kota dan jumlah penduduk. Tingkat kebutuhan dinilai berdasarkan standar perencanaan terkait dengan jumlah penduduk hasil proyeksi, sehingga fungsi Cakke sebagai pusat pelayanan terhadap wilayah sekitarnya dapat dioptimalkan melalui ketersediaan kelengkapan sarana perkotaan.

F. Defenisi Operasional

Kota adalah pusat dari kegiatan ekonomi, pemerintahan, politik dan sosial sehingga membuat perkembangan di segala bidang seperti pembangunan fisik kota, yaitu bangunan-bangunan yang mempunyai fungsi-fungsi tertentu dan juga pembangunan manusianya yang tinggal di kota maupun yang beraktivitas dengan keahlian maupun kemakmuran.

Sarana kebudayaan dan rekreasi, yang dimaksud adalah bangunan yang diperuntukkan bagi aktivitas-aktivitas kebudayaan dan atau rekreasi seperti gedung pertemuan, gedung serba guna, bioskop, gedung kesenian dan lain-lain. Jenis sarana ini tergantung dari tata kehidupan penduduknya dan struktur sosial penduduknya.

Tujuan pengembangan kota adalah pembangunan kota itu sendiri dalam arti bahwa kondisi kota menjadi lebih baik di segala sektor; yang meliputi sektor jasa dan pertanian (paling tidak pengelolaan hasil pertanian dan dari segi pendapatan masyarakat atau segi pengeluaran konsumsi, investasi dan pemerintah daerah serta ekspor impornya).

G. Kerangka Fikir

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Tinjauan Umum Wilayah Kecamatan Anggeraja

Kecamatan Anggeraja merupakan salah satu wilayah kecamatan yang terdapat di Kabupaten Enrekang. Tinjauan umum wilayah Kecamatan Anggeraja pada dasarnya merupakan kajian makro yang akan menguraikan peran dan fungsi Cakke, serta keterkaitan Cakke terhadap kawasan di sekitarnya. Kajian makro yang dimaksudkan menguraikan tentang peran dan fungsi Cakke, aspek fisik dan geografis wilayah, kegiatan sektor perekonomian, kependudukan, dan ketersediaan sarana.

a. Karakteristik Geografis Wilayah

Kecamatan Anggeraja secara administrasi merupakan wilayah daerah tingkat II Kabupaten Enrekang yang secara administrasi terdiri dari 15 Desa/Kelurahan. Bentangan wilayah Kecamatan Anggeraja meliputi daratan seluas 12.534 Ha dengan batasan-batasan wilayah sebagai berikut :

Bagian Utara : Kecamatan

Alla

Bagian Timur : Kecamatan Baraka

Bagian Selatan : Kecamatan Maiwa

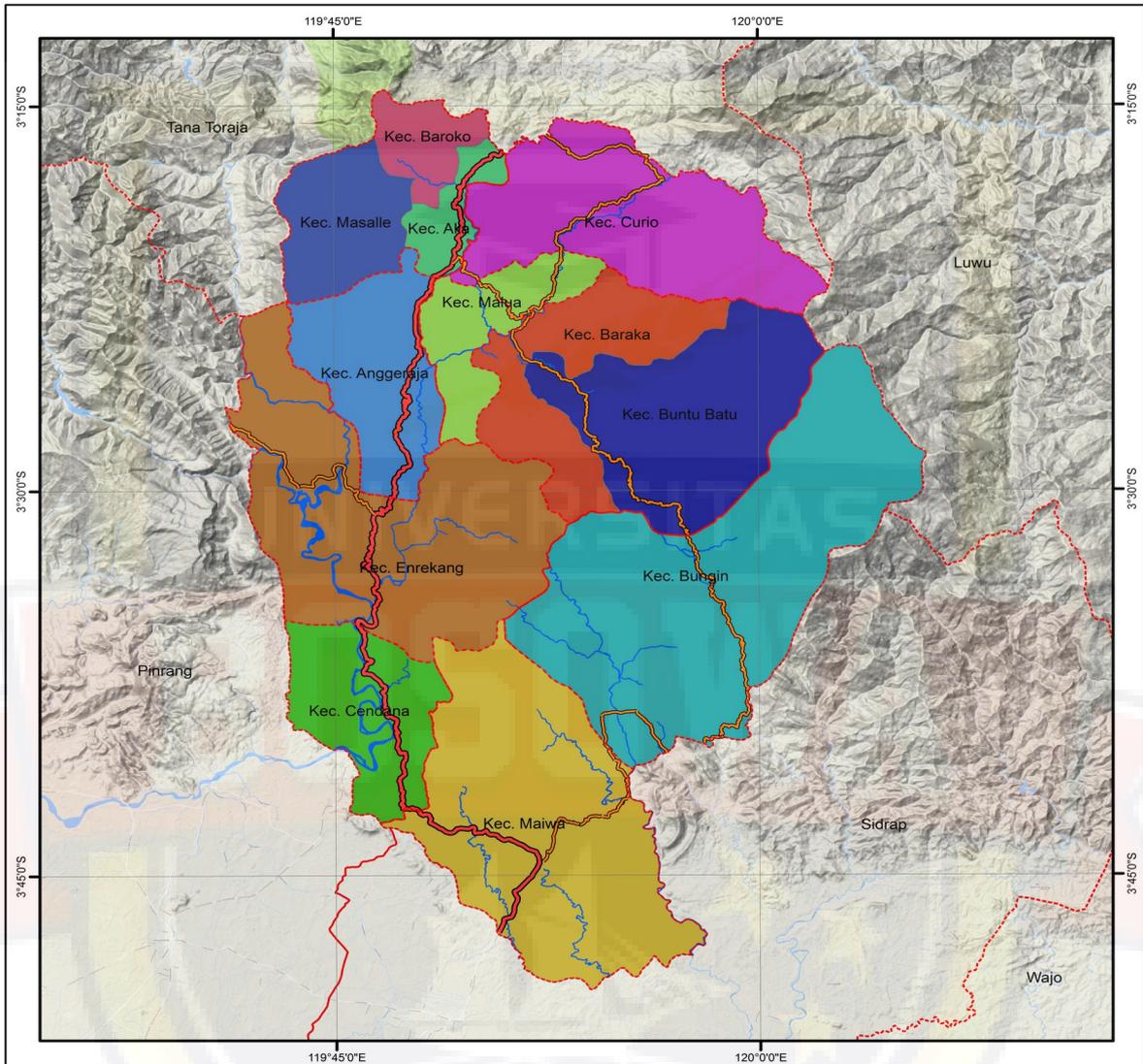
Bagian Barat : Kabupaten Pinrang

Gambar 4.1
Peta Admistrasi Kabupaten
Enrekang

UNIVERSITAS

BOSOWA





Peta Administrasi Kabupaten Enrekang

<p>JUDUL SKRIPSI : Kebutuhan Sarana Perkotaan di Kecamatan Cakke Sebagai ibukota Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang</p> <p>JUDUL PETA : Administrasi Kabupaten Enrekang</p> <p>SKALA : 1 : 370,000</p> <p>SUMBER PETA : - Data Base Indonesia - Peta Administrasi Kabupaten Enrekang - Survey Lapangan</p> <p>MAHASISWA : Rachmat Anda Nappasa</p> <p>PEMBIMBING : Dr.Ir. Syafri., M.Si Rusneni, ST.,M.Si</p>	<p>KETERANGAN :</p> <ul style="list-style-type: none"> ----- Batas Kabupaten ----- Batas Kecamatan ----- Jalan Kolektor Primer ----- Jalan Kolektor Sekunder ----- Sungai Utama <p>Nama Kecamatan</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">Kec. Cendana</td> <td style="width: 50%;">Kec. Alla</td> </tr> <tr> <td>Kec. Curio</td> <td>Kec. Anggeraja</td> </tr> <tr> <td>Kec. Enrekang</td> <td>Kec. Baraka</td> </tr> <tr> <td>Kec. Maiwa</td> <td>Kec. Baroko</td> </tr> <tr> <td>Kec. Malua</td> <td>Kec. Bungin</td> </tr> <tr> <td>Kec. Masalle</td> <td>Kec. Buntu Batu</td> </tr> </table> <p>SISTEM KOORDINAT :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Proyeksi : Tranverse Mercator - Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Tranverse Meclator - Datum Horizontal : WGS 1984 - Zone 50S 	Kec. Cendana	Kec. Alla	Kec. Curio	Kec. Anggeraja	Kec. Enrekang	Kec. Baraka	Kec. Maiwa	Kec. Baroko	Kec. Malua	Kec. Bungin	Kec. Masalle	Kec. Buntu Batu	<p>INSERT PETA :</p> <p>116°52'0"E 118°54'0"E 120°56'0"E 125°0'0"E</p> <p>7°10'0"S 7°10'0"S 7°10'0"S 7°10'0"S</p> <p style="text-align: center;">Kabupaten Enrekang</p> <p style="text-align: center;">PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR 2018</p>
Kec. Cendana	Kec. Alla													
Kec. Curio	Kec. Anggeraja													
Kec. Enrekang	Kec. Baraka													
Kec. Maiwa	Kec. Baroko													
Kec. Malua	Kec. Bungin													
Kec. Masalle	Kec. Buntu Batu													

Secara rinci luas wilayah Kecamatan Anggeraja berdasarkan jumlah kelurahan. Dapat dilihat pada tabel 4.1.

**Tabel
4.1
Luas dan Ketinggian Masing-
Masing Desa/Kelurahan**

No.	Desa/ Kelurahan	Luas (Km ²)
1.	Tindallun	12,18
2.	Bambapuang	9,20
3.	Tanete	10,45
4.	Lakawan	9,3
5.	Siambo	6,51
6.	Singki	12,08
7.	Mataran	4,98
8.	Pekalobean	9,92
9.	Bubun Lamba	4,33
10.	Salu Dewata	13,15
11.	Mampu	10,64
12.	Batu Noni	5,05
13.	Saruran	4,10
14.	Tampo	7,45
15.	Mandatte	4,36

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Enrekang tahun 2017

b. Topografi

Bentuk permukaan alam (topografi) merupakan penentuan utama dari bentuk suatu wilayah. Menurut departemen Kimpraswil Standar lokasi dan Kriteria teknik untuk kelerengan adalah :

- 1) 0 - 8% = daerah datar, sangat sesuai untuk pengembangan pertanian
- 2) 8 - 15% = daerah landai, sesuai
- 3) 15 - 25% = daerah agak curam
- 4) 25 - 45 = daerah Curam
- 5) ≥ 45 % = daerah sangat curam

Secara umum wilayah Kecamatan Anggeraja berada pada ketinggian 500-1000 MDPL, yang merupakan daerah pegunungan. Bentuk permukaan lereng sangat bervariasi yaitu datar, relatif bergelombang hingga berbukit. Tingkat kemiringan lereng berkisar 0-8% berada di Kelurahan Tanete, Kelurahan Lakawan, dan Kelurahan Mataran yang sangat cocok dikembangkan sebagai kawasan budidaya dengan pengembangan kawasan permukiman dengan prasarana dan sarana pendukung. Tingkat kemiringan 8-15%, 15-30% hingga di atas 40% tersebar di kelurahan lain yang berada di lingkup Kecamatan Anggeraja. Dengan demikian dapat dijelaskan pada Kecamatan Anggeraja apabila ditinjau dari aspek fisik dasar (tofografi) sesuai untuk pengembangan kawasan budidaya.

c. Jenis Tanah dan Batuan

Jenis tanah di Kecamatan Anggeraja tersusun atas jenis tanah pedsolik, mediteran, regosol, dan kompleks litosol. Jenis tanah aluvial bergambut tersebar pada daerah dataran, yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kegiatan pertanian. Jenis tanah mediteran dan regosol sebagian besar tersebar hampir di seluruh wilayah kecamatan, dan dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kegiatan perkebunan.

d. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di suatu kota adalah suatu konfigurasi lokasi berbagai kegiatan penduduk di dalam ruang kota dan kegiatan perkotaan lainnya. Pola penggunaan lahan merupakan manifestasi fisik penjabaran berbagai kegiatan di dalam ruang kota. Perkembangan kegiatan akan mengakibatkan terjadinya pergeseran pada penggunaan lahan.

Pengamatan terhadap pola penggunaan lahan akan menghasilkan gambaran pola penyebaran berbagai kegiatan yang ada dan kemungkinan perkembangannya di masa yang akan datang. Gambaran pola penyebaran berbagai kegiatan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam arahan perkembangan kota.

Luas kecamatan anggeraja adalah 12.534 Ha. Saat ini 35% merupakan kawasan terbangun dan 65% kawasan belum terbangun berupa lahan-lahan pertanian, perkebunan, dan hutan konservasi. Untuk mengetahui penggunaan lahan di Kecamatan Anggeraja pada tahun 2009, dapat kita lihat pada tabel 4.2.

**Tabel
4.2
Penggunaan Lahan Kecamatan
Anggeraja Tahun 2016**

Penggunaan Lahan	Luas (ha)	Persentase (%)
Persawahan	165,23	1,32
Permukiman dan Fasilitas	3.626	28,93
Perkebunan Campuran	5.231,77	41,74
Lahan Non Pertanian	3511	28,01
Jumlah	12.534	100

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Enrekang tahun 2017

e. Kependudukan

Kajian kependudukan merupakan indikator untuk mengetahui perkembangan penduduk kota, pola penyebaran dan distribusi, serta tingkat pelayanan fasilitas terhadap penduduk. Untuk maksud hal tersebut

maka dalam pembahasan ini akan dikaji tentang jumlah dan perkembangan penduduk di Kecamatan Anggeraja.

1) Perkembangan Jumlah Penduduk Kecamatan Anggeraja

Pada tahun 2013 jumlah penduduk Kecamatan Anggeraja kurang lebih 23.994 jiwa, jumlah ini terus mengalami peningkatan sehingga menjadi kurang lebih 25.330 jiwa pada tahun 2017. Tingkat pertumbuhan tersebut selain dipengaruhi oleh faktor alami (fertilitas dan mortalitas) juga dipengaruhi oleh migrasi penduduk yaitu perbandingan jumlah penduduk masuk dan keluar dari wilayah Kecamatan Anggeraja. Perkembangan jumlah penduduk 5 tahun terakhir (2013-2017) diuraikan pada tabel 4.3.

**Tabel
4.3
Perkembangan Jumlah
Penduduk tahun 2013-2017**

No.	Tahun	Penduduk (jiwa)	Perkembangan (jiwa)	Pertumbuhan (%)
1	2013	23.994	557	1.01
2	2014	24.652	658	1,19
3	2015	24.867	215	0,44

4	2016	25.109	242	0,8 4
5	2017	25.330	221	0,6 4

Sumber : BPS Kab. Enrekang Tahun 2017

2) Distribusi dan Kepadatan Penduduk Kecamatan Anggeraja

Distribusi penduduk merupakan persebaran penduduk pada suatu wilayah, sedangkan kepadatan penduduk adalah perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas lahan yang ditempati. Sumber data yang diperoleh menunjukkan penduduk Kecamatan Anggeraja pada tahun 2017 terdistribusi pada 15 Kelurahan/Desa. Masing-masing Kelurahan/Desa memiliki tingkat distribusi penduduk yang berbeda, sebagian besar penduduk terkonsentrasi di Kelurahan Lakawan dengan jumlah penduduk 3.315 jiwa. Sedangkan Kelurahan/Desa yang memiliki tingkat distribusi penduduk yang rendah adalah Kelurahan Saludewata dengan jumlah penduduk kurang lebih 851 jiwa. Untuk lebih jelasnya lihat tabel 4.4.

Tab el 4.4

Distribusi dan Kepadatan Penduduk di Kecamatan Anggeraja Tahun 2016

No.	Desa/ Kelurahan	Penduduk (Jiwa)	Luas Wilayah (Km²)	Kepadatan (Jiwa/Km²)
1	Tindallun	744	12,18	61,08
2	Bambapuang	1976	9,20	21,48
3	Tanete	2979	10,45	285,07
4	Lakawan	3538	9,3	380,04
5	Siambo	1050	6,51	161,29
6	Singki	1562	12,08	129,30
7	Mataran	2746	4,98	551,41
8	Pekalobean	1911	9,92	192,64
9	Bubun Lamba	1313	4,33	303,23
10.	Salu Dewata	957	13,15	72,77
11.	Mampu	1426	10,64	134,02
12.	Batu Noni	2446	5,05	484,36
13.	Saruran	991	4,1	241,18
14.	Tampo	1001	7,45	134,36
15.	Mandatte	690	4,36	115
	Jumlah	25.330	125,34	3267,23

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Enrekang tahun 2017

f. Sarana Pelayanan Sosial Dan Ekonomi di Kecamatan Anggeraja

1) Fasilitas Pemerintahan dan Pelayanan Umum

Guna menunjang kegiatan pelayanan umum terhadap masyarakat dalam suatu wilayah kecamatan diperlukan ketersediaan fasilitas perkantoran dan pelayanan umum. Fasilitas perkantoran dan pelayanan umum di Kecamatan Anggeraja ditunjang oleh keberadaan Kantor Kecamatan yang terdapat di Kelurahan Lakawan, Kantor Desa dan Kelurahan, serta Kantor Polisi (Polsek) yang terletak di Kelurahan Tanete dan Kantor Koramil yang terletak di Kelurahan Lakawan. Selain itu di Kelurahan Lakawan juga terdapat Kantor Cabang Diknas Kecamatan Anggeraja, KUA, Kantor Dinas Infokom & PDE, Kantor Koordinator Statistik Kecamatan, Kantor Cabang Dinas Pertanian Rakyat, Kantor Dinas Kehutanan & Perkebunan, Kantor Cabang Dinas Peternakan. Untuk kantor pelayanan umum seperti Kantor Pos & Giro serta Kantor PLN terdapat di Kelurahan Mataran. Secara rinci

jumlah dan jenis fasilitas perkantoran pemerintahan dan pelayanan umum di Kecamatan Anggeraja diuraikan pada tabel 4.5.

Tabel 4.5
Jenis Dan Jumlah Sarana Pemerintahan Dan Pelayanan Umum Di Kecamatan Anggeraja tahun 2016

No.	Desa/ Kelurahan	Jenis Sarana Pemerintahan dan Pelayanan Umum		
		Kantor Pemerintahan	Kantor Militer	Kantor Pelayanan Umum
1	Tindallun	3	-	
2	Bambapuang	5	-	
3	Tanete	4	1	
4	Lakawan	4	1	
5	Siambo	2	-	
6	Singki	3	-	

7	Mataran	3	-	2
8	Pekalobean	5	-	
9	Bubun Lamba	2	-	
10.	Salu Dewata	3	-	
11.	Mampu	4	-	
12.	Batu Noni	3	-	
13.	Saruran	2	-	
14.	Tampo	2	-	
15.	Mandatte	2	-	
	Jumlah	47	2	2

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Enrekang tahun 2017

2) Sarana Perdagangan dan Jasa

Peran sarana perdagangan berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Keberadaan sarana ini sangat menunjang dalam perkembangan kota, selain fungsinya sebagai sarana untuk berbelanja juga berfungsi sebagai pendistribusi barang kebutuhan masyarakat. Hasil pengamatan dan sumber data yang diperoleh menunjukkan bahwa ketersediaan sarana perdagangan di Kecamatan Anggeraja

berupa pasar, toko (pertokoan/ruko) dan koperasi dapat kita lihat secara rinci pada tabel 4.6.

Tabel 4.6
Jumlah Dan Jenis Sarana Perdagangan
Di Kecamatan Anggeraja tahun 2016

No.	Desa/ Kelurahan	Jenis Sarana Perdagangan			
		Pasar	Warung	Toko (Pertokoan/ Ruko)	Mini Market
1.	Tindallun	-	6	-	-
2.	Bambapuang	1	1 2	4	-
3.	Tanete	-	1 3	-	1
4.	Lakawan	1	2 9	8	1
5.	Siambo	-	6	-	-
6.	Singki	-	8	2	-
7.	Mataran	-	3 9	15	-
8.	Pekalobean	-	8	1	-
9.	Bubun Lamba	-	1 0	2	-
10.	Salu Dewata	-	9	5	-
11.	Mampu	-	1 1	3	-
12.	Batu Noni	-	7	4	-
13.	Saruran	-	1 0	7	-
14.	Tampo	-	5	-	-
15.	Mandatte	-	9	1	-

.					
	Jumlah	2	182	52	2

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Enrekang tahun 2017

3) Sarana Pendidikan

Sarana pendidikan yang terdapat di Kecamatan Anggeraja terdiri atas Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MIS), Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTS), dan Sekolah Menengah Atas (SMA)/SMK/ Madrasah Aliyah. Secara rinci sarana pendidikan di Kecamatan Anggeraja dapat kita lihat pada table. 47.

Tabel 4.7
Jenis Dan Jumlah Sarana Pendidikan Di Kecamatan Anggeraja tahun 2016

No	Desa/ Kelurahan	Jenis Sarana Pendidikan			
		TK	SD/ MIS	SMP/ MTS	SMA/ SMK/MA
1	Tindallun	1	1	-	-
2	Bambapuang	1	2	1	1
3	Tanete	1	2	2	2
4	Lakawan	2	3	1	-
5	Siambo	1	1	1	-

.					
6	Singki	1	2	1	-
7	Mataran	2	2	2	1
8	Pekalobean	1	3	-	-
9	Bubun Lamba	1	-	1	1
10.	Salu Dewata	1	1	-	-
11.	Mampu	1	1	-	-
12.	Batu Noni	1	2	-	-
13.	Saruran	1	1	-	-
14.	Tampo	1	1	-	-
15.	Mandatte	-	1	-	-
	Jumlah	15	23	9	5

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Enrekang tahun 2017

4) Sarana Peribadatan

Penduduk di kecamatan anggeraja didominasi oleh pemeluk agama islam, oleh karenanya sarana peribadatan yang tersedia terdiri dari mesjid dan musholla, sedangkan sarana peribadatan berupa gereja, kuil, pura dan vihara tidak tersedia. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 4.8.

Tabel 4.8
Jenis Dan Jumlah Peribadatan Di Kecamatan Anggeraja tahun 2016

No.	Desa/	Jenis Peribadatan	Sarana
-----	-------	-------------------	--------

	Kelurahan	Mesjid	Langgar(Musholla)
1.	Tindallun	3	-
2.	Bambapuang	1	6
3.	Tanete	5	5
4.	Lakawan	5	-
5.	Siambo	2	2
6.	Singki	4	-
7.	Mataran	2	1
8.	Pekalobean	6	-
9.	Bubun Lamba	2	2
10.	Salu Dewata	4	-
11.	Mampu	3	1
12.	Batu Noni	3	-
13.	Saruran	2	1
14.	Tampo	3	-
15.	Mandatte	1	-
Jumlah		46	18

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Enrekang tahun 2017

5) Sarana Kesehatan

Sarana kesehatan berfungsi tidak hanya sebagai tempat pengobatan tetapi juga berperan sebagai pelayanan kesehatan atau media untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Sistem distribusi pelayanan kesehatan sangat ditentukan jenis dan banyaknya sarana kesehatan yang tersedia, yang ditunjang oleh peralatan medis yang memadai, serta

mobilisasi obat-obatan. Hingga saat ini pelayanan kesehatan di Kecamatan Anggeraja ditunjang oleh ketersediaan sarana berupa Rumah Sakit, Puskesmas/Pustu/Polindes, dan Posyandu, secara rinci data jumlah dan jenis sarana peribadatan diuraikan pada tabel 4.9.

Tabel 4.9
Jenis Dan Jumlah Sarana Kesehatan Di
Kecamatan Anggeraja

No	Desa/ Kelurahan	Jenis Sarana Kesehatan		
		Rumah Sakit	Puskesmas / Pustu/Polin des	Posyand u
1	Tindallun	-	1	1
2	Bambapuang	-	1	2
3	Tanete	-	-	2
4	Lakawan	1	1	2
5	Siambo	-	1	1
6	Singk i	-	1	2
7	Mataran	-	-	2
8	Pekalobean	-	1	2
9	Bubun Lamba	-	1	1
10.	Salu Dewata	-	1	1
11.	Mampu	-	1	1

12.	Batu Noni	-	1	2
13.	Saruran	-	1	1
14.	Tampo	-	1	1
15.	Mandatte	-	1	1
Jumlah		1	13	23

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Enrekang tahun 2017

2. Karakteristik Pengembangan Cakke

a. Peran Dan Fungsi Cakke

Kedudukan Kota Cakke terhadap pusat pertumbuhan dalam lingkup regional dan lingkup lokal merupakan pusat berbagai kegiatan dan konsentrasi pelayanan, maka Kota Cakke berperan sebagai ibukota Kecamatan Anggeraja, yang diharapkan dapat membawa pengaruh terhadap daerah di sekitarnya.

Fungsi yang diemban kota sebagai simpul permukiman/perumahan, pelayanan jasa dan distribusi dengan dukungan aktifitas perkotaan berupa:

- 1) Pusat kegiatan perkantoran dan jasa
- 2) Pusat kegiatan perdagangan
- 3) Pusat kegiatan pelayanan fasilitas sosial
- 4) Penunjang permukiman

Pada dasarnya kota-kota mempunyai fungsi-fungsi tertentu baik fungsi dasar (primer) dan fungsi komplementer (sekunder). Perkembangan suatu kota akan terjadi secara alamiah seiring dengan perkembangan penduduk. Namun demikian, dalam perkembangannya terkadang tidak sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Perkembangan kota secara terus menerus dan terpusat pada titik tertentu akan mengakibatkan peningkatan beban kota tersebut. Untuk menghindari pemusatan kegiatan dan beban kota yang tinggi diharapkan adanya pendistribusian kegiatan ke beberapa bagian wilayah kota lainnya.

1) Fungsi Primer

Fungsi dasar (primer) adalah fungsi pembentuk struktur perkotaan di mana elemen-elemen pengikat struktur berdaya jangkauan regional, namun dalam hal tertentu fungsi ini kadangkala berfungsi ganda, yakni berfungsi sebagai pelayanan skala regional dan skala lokal. Hal ini dapat berlaku di Kota Cakke. Fungsi primer Kota Cakke dalam kedudukannya sebagai Ibukota Kecamatan Anggeraja meliputi :

- a) Sebagai pusat pemerintahan dan pelayanan umum skala kecamatan, sarana pendukungnya adalah 1 unit kantor kecamatan, 1 unit Kantor Polsek, 1 unit Kantor Kecamatan, 1 unit Kantor Pos dan Giro, Kantor Urusan Agama, gedung serba guna dan lainnya.
- b) Sebagai pusat perdagangan, dengan sarana pendukung berupa pasar, pertokoan dan terminal.
- c) Sebagai pusat pendidikan, sarana pendukung SLTP dan SMU.
- d) Sebagai pusat pelayanan kesehatan, dengan sarana pendukung 1 unit Puskesmas, BKIA, dan Balai Pengobatan.

2) Fungsi Komplemen

Fungsi komplemen adalah fungsi pengubah struktur kota, di mana elemen-elemen pengikat struktur berdaya jangkauan lokal. Fungsi komplemen Cakke meliputi :

- Perdagangan dengan klasifikasi lingkungan seperti, ruko, kios dan warung serta lembaga ekonomi desa.

- Sektor pendidikan, terdiri dari TK dan SD.
- Sektor kesehatan seperti posyandu, apotik, dan lainnya.
- Sektor pemerintahan yaitu Kantor Desa/Kelurahan.
- Sektor keagamaan yaitu masjid dan musholla.
- Sektor pariwisata yaitu potensi panorama alam dan kegiatan pertanian mendukung pengembangan agrowisata. Disamping itu, terdapat sarana rekreasi lokal seperti lapangan sepak bola, bulutangkis dan taman tempat bermain.

Penentuan fungsi-fungsi tersebut di atas, perlu dilihat kaitannya baik terhadap fungsi dalam lingkup Kota Cakke maupun terhadap daerah sekitarnya, karena fungsi dan perannya cenderung sebagai pusat orientasi dari simpul-simpul daerah sekitarnya.

b. Karakteristik Fisik Cakke

1) Batasan Dan Luas Wilayah

Kota Cakke terdiri atas tiga kelurahan yaitu Kelurahan Tanete, Kelurahan Lakawan Dan Kelurahan Mataran yang merupakan pusat kegiatan di Kecamatan Anggeraja. Kota Cakke memiliki luas kurang lebih 2.473 Ha. Dengan demikian batasan Kota Cakke mengikuti batas wilayah ketiga kelurahan tersebut yang meliputi :

Sebelah Utara : Desa Bubun Lamba

Sebelah Selatan : Desa Bambapuung

Sebelah Timur : Desa Siambo

Sebelah Barat : Desa Tampo Dan Desa Batu Noni

2) Ketinggian Dan Kemiringan Lereng

Kota berada pada ketinggian 500-1000 mdpl. Ketiga kelurahan yang tergabung memiliki topografi yang relatif bervariasi dari datar sampai pada kondisi landai, dengan penggunaan lahan mayoritas kebun campuran. Dengan kemiringan lereng yang berkisar antara 0-8 % dan 8-15 %. Kondisi lahan yang cukup datar terdapat pada pusat aktifitas kota dan permukiman masyarakat

maka diperlukan pematangan dan pengamanan lahan sebelum dilakukan pembangunan.



Gambar 4.3

3) Kondisi Hidrologi

Pada umumnya untuk kebutuhan air baku di Cakke penduduk memanfaatkan beberapa sumber mata air dan air tanah dangkal (sumur). Umumnya air tanah dangkal memiliki kedalaman 10 - 20 m, sedangkan untuk air tanah dalam memiliki kedalaman 20 - 30m. Kota Cakke dilintasi oleh Sungai Mata Allo sehingga penduduk memanfaatkan air sungai tersebut untuk kegiatan pertanian misalnya untuk irigasi.

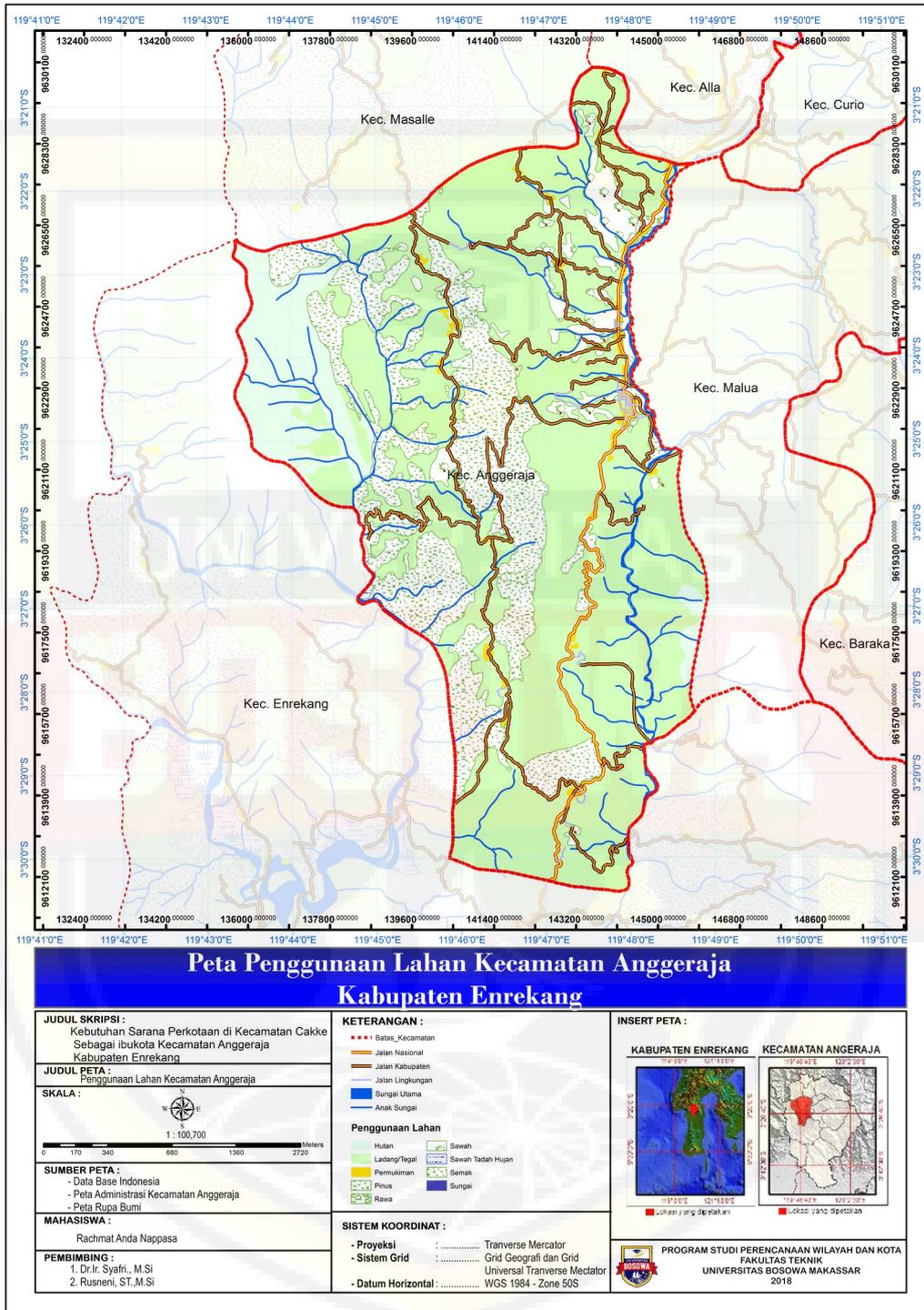
4) Pola Penggunaan Lahan

Secara umum Kota Cakke terdiri dari lahan permukiman dan bangunan lainnya, persawahan, perkebunan dan lahan yang tidak diusahakan. Sumber data yang diperoleh, menyajikan rincian penggunaan lahan berdasarkan batas administrasi Kelurahan yang merupakan lingkup pelayanan kawasan perkotaan. Kondisi penggunaan lahan berdasarkan batasan tersebut dapat dilihat pada tabel 4.10.

Tabel 4.10
Pola Penggunaan Lahan Di Kota
Cakke

Penggunaan Lahan	Luas(Ha)	Persentase (%)
Persawahan	25,65	1,04
Permukiman dan Fasilitas	979	27,46
Perkebunan Campuran	1.393,35	68,47
Lahan Non Pertanian	75	3,03
Jumlah	2.473	100

Gambar 4.3
Peta Administrasi
Kecamatan Anggeraja



Penduduk Cakke sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani. Oleh karena itu dari

2.473 ha luas wilayah Cakke, Penggunaan lahan di didominasi oleh perkebunan campuran dengan luas 1.3935,35 ha persentase 68,47 %. 979 ha untuk lahan permukiman dan fasilitas dengan persentase 27,46 % dan 75 ha lahan non pertanian dengan persentase 3,03 %, serta persawahan dengan luasan 25,65 ha persentase 1,04 %.

5) Sarana Pelayanan Sosial Dan Ekonomi di Cakke

a) Sarana Pemerintahan dan Pelayanan Umum

Sarana perkantoran di Cakke ditunjang oleh keberadaan Kantor Kecamatan yang terdapat di Kelurahan Lakawan, Kantor Kelurahan, serta Kantor Polisi (Polsek) yang terletak di Kelurahan Tanete dan Kantor Koramil yang terletak di Kelurahan Lakawan. Selain itu di Kelurahan Lakawan juga terdapat Kantor Cabang Diknas Kecamatan Anggeraja, KUA, Kantor Dinas Infokom & PDE, Kantor Koordinator Statistik Kecamatan, Kantor Cabang Dinas Pertanian Rakyat, Kantor Dinas Kehutanan & Perkebunan, Kantor Cabang Dinas Peternakan. Untuk kantor pelayanan umum seperti Kantor Pos & Giro serta Kantor PLN terdapat di Kelurahan Mataran. Sarana

pemerintahan dan pelayanan umum di Cakke dapat dilihat secara rinci pada tabel 4.11.

Tabel 4.11
Jenis Dan Jumlah Sarana Pemerintahan Dan Pelayanan Umum
Di Cakke Tahun 2016

No.	Desa/ Kelurahan	Jenis Sarana Perkantoran		
		Kantor Pemerintah	Kantor Militer	Kantor Pelayanan Umum
1.	Tanete	4	1	-
2.	Lakawan	4	1	-
3.	Mataran	3	-	2
Jumlah		11	2	2

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Enrekang tahun 2017



b) Sarana
Perdagangan

Hasil
pengamatan
dan sumber
data yang
diperoleh
menunjukkan

bahwa ketersediaan sarana perdagangan di Kecamatan Anggeraja berupa pasar, toko (pertokoan/ruko) dan warung. Seperti pada gambar 4.4, 4.5.



Gambar 4.3 Foto Pasar Cakke

Gambar 4.5 Foto Pasar dan Pertokoan (Ruko)

Untuk lebih jelasnya sarana perdagangan di Kota Cakke

dapat dilihat secara rinci pada tabel 4.12.

Tabel 4.12
Jenis dan Jumlah Sarana Perdagangan di Cakke

No.	Sarana Perdagangan	Eksisting (unit)
1.	Pasar	1
2.	Warung	81
3.	Toko (Pertokoan/Ruko)	23
4.	Mini Market	1
Jumlah		106

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Enrekang tahun 2017

c) Sarana Pendidikan

Sarana pendidikan yang terdapat di Kota Cakke terdiri atas Taman Kanak-

Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Sarana pendidikan tersebut dapat dilihat pada gambar 4.8.





Gambar 4.6 foto Taman Kanak-Kanak Pertiwi



Gambar 4.7 Foto SDN 39 CAKKE



BOSOWA



Gambar 13 Foto SMA Negeri 1 Anggeraja



Gambar 4.9 Foto SMAN 1 Anggeraja Untuk Sarana Pendidikan di Cakke Secara rinci dapat dilihat pada tabel 4.8.

Tabel 4.13
Jenis dan Jumlah Sarana Pendidikan di Cakke tahun 2016

No.	Desa/ Kelurahan	Eksisting (unit)
1.	TK	5
2.	SD/MIS	7
3.	SMP/MTS	5
4.	SMA/SMK/MA	3
Jumlah		20

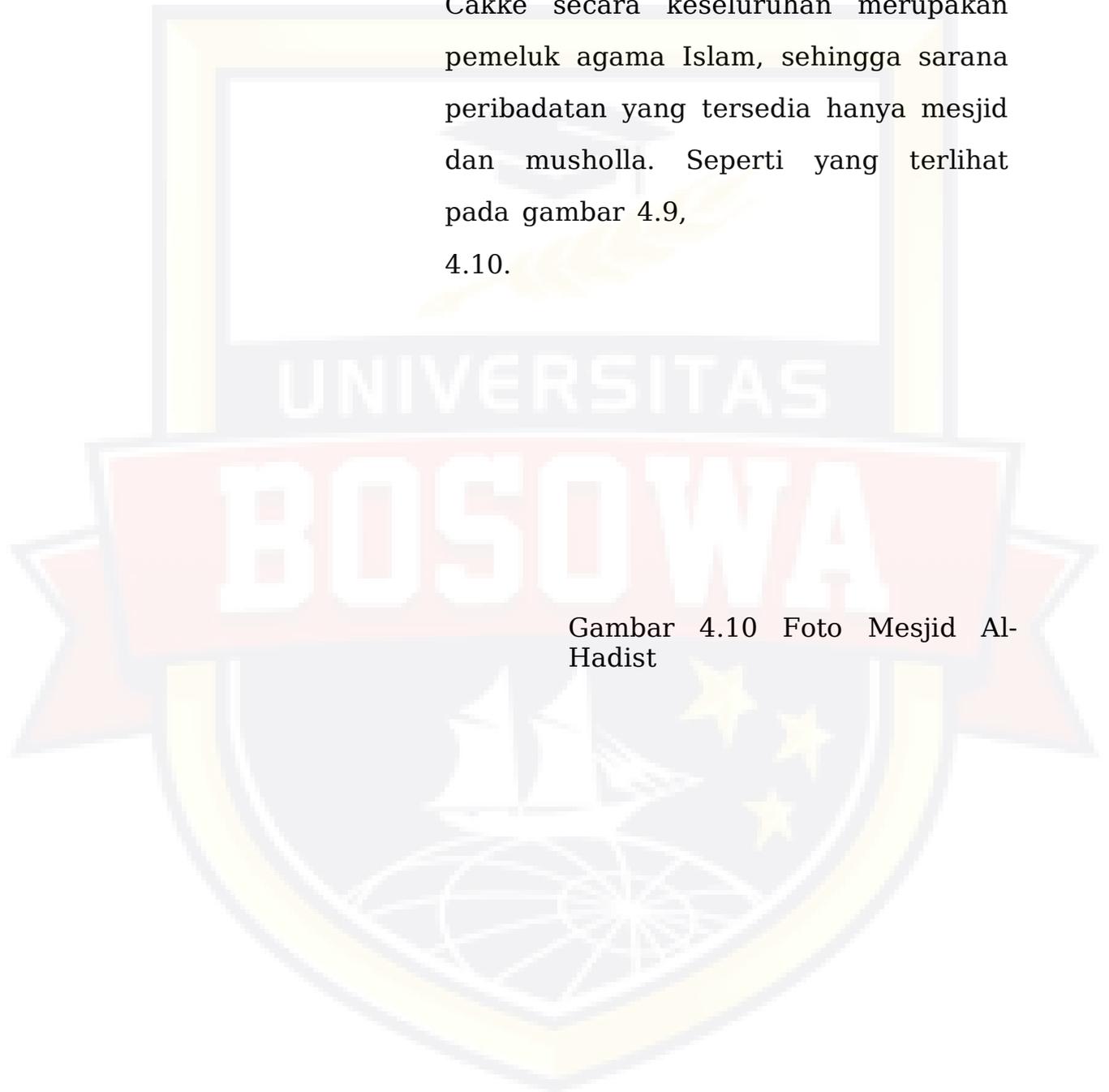
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Brebes tahun 2017

d) Sarana Peribadatan



Sumber data yang diperoleh menunjukkan bahwa penduduk Kota Cakke secara keseluruhan merupakan pemeluk agama Islam, sehingga sarana peribadatan yang tersedia hanya mesjid dan musholla. Seperti yang terlihat pada gambar 4.9, 4.10.

Gambar 4.10 Foto Mesjid Al-Hadist





Gambar 4.11 Foto Mesjid Alhamrha
Secara rinci sarana peribadatan di Kota Cakke dapat dilihat pada tabel 4.9

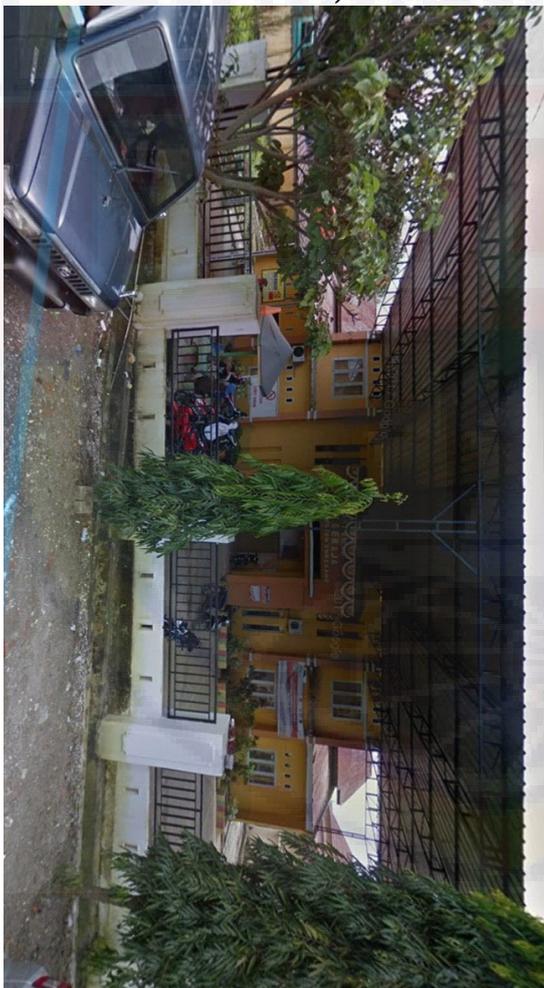
**Tabel
4.14
Jenis dan Jumlah
sarana peribadatan
Di Cakke
tahun 2016**

No.	Desa/ Kelurahan	Eksistensi (unit)
1.	Mesji	12

	d	
2.	Musholla	6
3.	Gereja	-
4.	Vihara	-
5.	Kuil	-
Jumlah		18

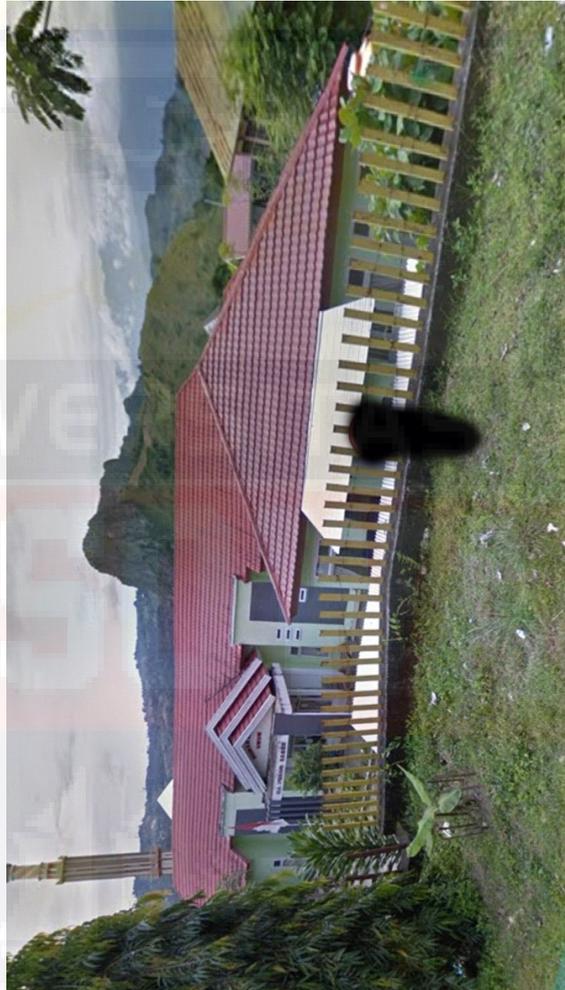
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Enrekang tahun 2017

e) Sarana Kesehatan



Berdasarkan hasil pengamatan sarana kesehatan yang tersedia di lokasi studi

berupa rumah sakit, puskesmas, apotik, dan balai pengobatan. Seperti pada gambar 4.11, 4.12, 4.13.



Gambar 4.12 Foto Puskesmas Anggeraja

Gambar 4.12 Foto Rumah Sakit Umum Hj. Puang Sabbe



Gambar 4.13
Foto Posyandu
Ketersediaan sarana kesehatan di Kota Cakke secara
rinci
dapat dilihat pada tabel 4.10.

**Tabel
4.15
Jenis dan Jumlah Sarana
Kesehatan
Di Cakke
tahun 2016**

No.	Desa/ Kelurahan	Eksisting (unit)
1.	Rumah Sakit	1
2.	Puskesmas/ Pustu	1
3.	Posyandu	5
4.	Apotik/Toko Obat	2
5.	Polindes/BP	-
Jumlah		9

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Enrekang tahun 2017

6) Kajian Kependudukan Cakke

Penduduk merupakan salah satu unsur utama dalam pembentukan wilayah dan kota, karakteristik penduduk merupakan faktor yang berpengaruh terhadap pengembangan atau pengembangan suatu kota. Aspek kependudukan yang memerlukan kajian dalam kerangka sistem penyediaan sarana perkotaan meliputi pertumbuhan dan proyeksi jumlah penduduk, serta distribusi dan kepadatan penduduk.

7) Pertumbuhan dan Proyeksi Penduduk

Pertumbuhan penduduk dalam suatu wilayah dipengaruhi oleh faktor kematian dan kelahiran (pertumbuhan alami), selain itu pertumbuhan penduduk dipengaruhi juga adanya faktor migrasi penduduk yaitu perpindahan keluar dan masuk. Sumber data yang diperoleh menunjukkan penduduk Kota Cakke pada tahun 2013 berjumlah kurang lebih 8.892 jiwa, sedangkan pada tahun 2017

mencapai kurang lebih 9.263 jiwa. Hal ini menunjukkan adanya penambahan penduduk sekitar 371 jiwa dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 0,81% pertahun selama kurun waktu 5 tahun terakhir.

Berdasarkan data perkembangan penduduk tersebut, maka dapat diproyeksikan atau diperkirakan jumlah penduduk hingga 20 tahun ke depan (hingga tahun 2037), dengan menggunakan metode proyeksi penduduk analisa bunga berganda. Berikut merupakan tabel penambahan penduduk dari 5 tahun terakhir.

Tabel 4.16
Pertumbuhan Jumlah Penduduk Cakke Tahun
2013-2017

No	Tahun	Jumlah Penduduk	Pertambahan (Jiwa)	Pertumbuhan (%)
1.	2013	8.892	-	-
2.	2014	8.981	89	1,04
3.	2015	9.096	115	1,46
4.	2016	9.186	90	1,05
5.	2017	9.263	77	0,90

Jumlah pertambahan penduduk	371	4,45
------------------------------------	------------	-------------

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Enrekang dan Hasil Analisis

$$P_n = P_0 (1 + r)^n$$

Ket :

P_0 : Jumlah Penduduk pada tahun dasar

P_n : Jumlah Penduduk pada tahun proyeksi n : Tingkat Pertumbuhan

n : Selisih Tahun

$$r = \frac{P_n - P_0}{P_0 \cdot n}$$

$$r = \frac{9.263 - 18.892,01}{18.892,01 \cdot 20}$$

$$n = 2037 - 2017 = 20$$

Jadi Proyeksi Penduduk pada Tahun 2017 (dimana $\Theta = 20$) adalah :

Rumus : $P_n = P_0 (1 + r)^n$

$$(1 + r)^n$$

$$P_{2037} = 9.263(1,01)$$

$$P_{2037} = 10.999$$

Jiwa

Di dapatkan :

$$P_{2037} = 9.620 \text{ Jiwa}$$

Hasil proyeksi penduduk yang diperoleh, menunjukkan perkiraan jumlah penduduk di Kota Cakke hingga tahun 2037 mencapai kurang lebih 10.999 jiwa. Jumlah penduduk hasil proyeksi tersebut bukan angka mutlak akan tetapi merupakan pendekatan untuk mengasumsikan kebutuhan penyediaan pelayanan sarana perkotaan berdasarkan ukuran dan skala pelayanan kota.

8) Distribusi dan kepadatan penduduk

Distribusi dan kepadatan penduduk pada setiap kawasan di Cakke tidak merata, yang membentuk pola linear menyebar. Dalam hal ini persebaran penduduk (permukiman) mengikuti pola jaringan jalan utama dan

membentuk kelompok-kelompok permukiman pada setiap bagian Cakke. Perbandingan jumlah penduduk terhadap luas wilayah di Cakke dapat memperlihatkan tingkat kepadatan penduduk sedang. Jumlah penduduk Cakke pada tahun 2017 kurang lebih 9.263 jiwa, sedangkan luas wilayah Kota Cakke 2.473 Ha, dengan demikian kepadatan penduduk rata-rata 3,19 jiwa/Ha.

Pembentukan kawasan perkotaan Cakke yang difungsikan sebagai Ibukota Kecamatan dan pusat pelayanan terhadap seluruh wilayah Kecamatan Anggeraja, membutuhkan penyediaan sarana yang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas pelayanan. Hal tersebut merupakan daya tarik yang mempengaruhi distribusi dan pertumbuhan penduduk di masa yang akan datang. Berdasarkan hasil proyeksi jumlah penduduk hingga tahun 2037 jumlah penduduk Cakke akan mencapai 10.999 jiwa. Guna efektifitas pelayanan sarana perkotaan maka distribusi dan kepadatan penduduk

perlu untuk diatur berdasarkan intensitas kegiatan pada masing-masing fungsi kawasan dalam lingkup Cakke.

B. Pembahasan

1. Analisa Ketersediaan Sarana Perkotaan di Cakke Sebagai Ibu Kota Kecamatan

Analisis ini digunakan untuk mengetahui tingkat ketersediaan sarana di Cakke untuk menunjang fungsinya sebagai pusat pelayanan terhadap Kecamatan Anggeraja. Tingkat ketersediaan dinilai berdasarkan standardisasi kebutuhan sarana perkotaan berdasarkan Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budi Daya (2007), dengan memberikan bobot pada masing-masing sarana berdasarkan tingkat ketersediaannya di Cakke. Sehingga fungsi Kota Cakke sebagai pusat pelayanan terhadap wilayah Kota sendiri dan daerah hinterlandnya dapat dioptimalkan melalui ketersediaan kelengkapan sarana perkotaan. Penilaian dilakukan dengan melihat kondisi di lapangan pada saat survey lapangan dengan menggunakan analisis skala likert.

- a. Identifikasi sarana perkotaan skala Ibu Kota Kecamatan di Kota Cakke

Adapun sarana perkotaan di Kota Cakke dilihat pada tabel berikut :

**Tabel
4.17
Kondisi
Eksisting
Sarana Cakke**

No	Bidang Pelayanan	Jumlah Eksisting
1	Sarana Pemerintahan dan Pelayanan Umum	
	1. Kantor Kecamatan 2. Kantor Kelurahan 3. Kantor Polsek 4. Kantor Koramil 5. Kantor Pos 6. Kantor Telepon 7. Balai Pertemuan 8. Balai Karya 9. Kantor Pemadam Kebakaran 10. KUA	1 3 1 1 1 1 1 - 1
2	Sarana Pendidikan	
	1. Taman Kanak-kanak 2. Sekolah Dasar 3. Sekolah Menengah Pertama 4. Sekolah Menengah Atas	5 7 5 3
3	Sarana Kesehatan	
	1. Puskesmas/Pustu	1 6

	2. Posyandu	3
	3. Tempat Praktek Dokter	2
	4. Apotik	
4	Sarana Peribadatan	
	1. Mesjid	12
	2. Musholla	6
5	Sarana Perdagangan	
	1. Bank	1
	2. Pasar	1
	3. Warung	81
6	Sarana Olahraga	
	1. GOR	-

Sumber : Departemen PU dan Kimpraswil Tahun 2017

Bidang pelayanan sarana pemerintahan dan pelayanan umum, diantaranya kantor pemerintahan yang terdiri dari 2 jenis yaitu kantor kecamatan sebanyak 1 unit dan kantor kelurahan sebanyak 3 unit, hal ini dikarenakan Cakke terdiri dari 3 kelurahan. Kantor militer terdiri dari 2 jenis yaitu kantor polsek dan kantor koramil yang masing-masing terdiri dari 1 unit. Selain kantor pemerintahan dan militer, di Cakke juga terdapat beberapa sarana pelayanan umum diantaranya Kantor Pos, Kantor Telepon, Balai Pertemuan, Balai Karya, dan KUA yang masing-masing terdiri dari 1 unit.

Sarana pendidikan terdiri dari 5 jenis sarana diantaranya, TK sebanyak 5 unit, SD sebanyak 7 unit, SMP Sebanyak 5 dan SMA sebanyak 3 unit.

Untuk sarana kesehatan terdiri dari 4 jenis sarana diantaranya Puskesmas/Pustu sebanyak 1 unit, Posyandu sebanyak 6 unit, Tempat Praktek Dokter 3 unit dan Apotik sebanyak 2 unit.

Penduduk Cakke secara keseluruhan beragama Islam sehingga sarana peribadatan yang terdapat di Cakke hanya terdiri dari 2 jenis sarana diantaranya Mesjid sebanyak 12 unit dan Mushalla/Langgar sebanyak 6 unit.

Untuk bidang pelayanan sarana ekonomi atau perdagangan yang dalam hal ini adalah pasar, bank, dan warung. Yang masing- masing erdiri dari pasar 1 unit, bank 1 unit dan warung sebanyak 81 unit yang tersebar pada masing-masing dusun/lingkungan di Cakke.

b. Penilaian terhadap tingkat ketersediaan sarana perkotaan yang terdapat di Cakke

Berdasarkan hasil pengamatan di lokasi studi, adapun penilaian untuk tingkat ketersediaan masing-

masing sarana perkotaan dengan menggunakan Skala Likert dapat dilihat pada tabel 4.14 berikut.

Tabel 4.18
Tingkat ketersediaan sarana perkotaan di Cakke

No	Bidang Pelayanan	Jumlah Eksisting	Seharusnya	Nilai	Bobot
1	Sarana Pemerintahan dan Pelayanan Umum				
	1. Kantor Kecamatan	1 3	1 3	5 5	90%
	2. Kantor Kelurahan	1 1	1 1	5 5	
	3. Kantor Polsek	1	1	5	
	4. Kantor Koramil	1	1	5	
	5. Kantor Pos	1	1	5	
	6. Kantor Telepon	1	1	5	
	7. Balai Pertemuan	-	1	1	
	8. Balai Karya				
	9. KUA	1	1	5	
2	Sarana Pendidikan				
	1. Taman Kanak-kanak	5 7	5 3	5 5	100%
	2. Sekolah Dasar	5	2	5	
	3. Sekolah Menengah Pertama	3	2	5	
	4. Sekolah Menengah Atas				
3	Sarana Kesehatan				
	1. Puskesmas/Pustu	1 5	1 6	5 3	85%
	2. Posyandu	1	2	5	
	3. Tempat Praktek	2	1	5	

	Dokter				
	4. Apotik				
4	Sarana Peribadatan				
	1. Mesjid	1	1	5	100%
	2. Musholla	2	3	5	
		6			
5	Sarana Perdagangan				
	1. Bank	1	1	5	100%
	2. Pasar	1	1	5	
	3. Warung	81	3 9	5	
6	Sarana Olahraga				
	1. GOR	-	1	1	0

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2017

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa tingkat ketersediaan sarana perkotaan di Cakke sebagai Ibu Kota Kecamatan dikategorikan baik. Karena jika dilihat dari penilaian untuk sebagian besar jenis sarana memiliki penilaian bobot rata-rata berada di atas 95% Yakni jika sarana perkotaan dapat memenuhi kebutuhan penduduk dan Sesuai dengan Standar Yang Di Keluarkan Dari Dinas PU. Walaupun masih terdapat beberapa sarana yang tidak maksimal pelayanannya seperti posyandu dan sarana yang sama sekali belum terdapat di lokasi yaitu Pemadam Kebakaran dan GOR.

Cakke perlu memaksimalkan perannya Sebagai Ibu Kota Kecamatan Anggeraja. Upaya yang dapat dilakukan adalah menambah jumlah sarana posyandu yang berdasarkan hasil analisis di atas masih kurang dan membangun Kantor Pemadam Kebakaran dan GOR demi memaksimalkan peran Cakke sebagai Ibu Kota Kecamatan Anggeraja.

Untuk sarana posyandu, perlu adanya penambahan karena sarana posyandu yang ada hanya terdapat di Kelurahan Lakawan dan Kelurahan Mataran. Sehingga pembangunan sarana posyandu ditempatkan di Kelurahan Tanete sehingga kesenjangan antara kelurahan tidak terjadi.

Untuk memaksimalkan peran Cakke sebagai Ibu Kota Kecamatan upaya lain yang perlu dilakukan adalah dengan membangun Kantor Pemadam Kebakaran. Pemadam kebakaran yang selama ini memberikan pelayanan bagi penduduk Kecamatan Anggeraja, berasal dari Ibu Kota Kabupaten yaitu Kota Enrekang. Mengingat jarak Kota Enrekang dari Cakke cukup jauh maka perlu

adanya Kantor Pemadam Kebakaran yang berlokasi di Kecamatan Anggeraja yang ditempatkan di Kota Cakke sebagai Ibu Kota Kecamatan Anggeraja.

Selain sarana posyandu dan Kantor Pemadam Kebakaran berdasarkan hasil analisis yang sarana yang perlu untuk dibangun yaitu GOR sebagai sarana olahraga. Gedung Olahraga (GOR) perlu untuk dibangun karena di Kecamatan Anggeraja hanya terdapat Lapangan Olahraga yang sebagian besar kondisinya juga kurang baik.

2. Analisis kebutuhan sarana perkotaan di Cakke sebagai Ibu Kota

Kecamatan tahun 2037

a. Sarana pemerintahan dan pelayanan umum

Sarana perkantoran memegang peranan penting dalam suatu kota oleh karena merupakan wadah yang berfungsi mengatur administrasi pemerintahan kota dan pelayanan terhadap masyarakat, serta pengelolaan kelembagaan dalam kota tersebut. Dari hasil dan sumber data yang diperoleh menunjukkan jumlah sarana perkantoran yang terdapat di Cakke

terdiri dari kantor pemerintahan (kecamatan dan kelurahan) sebanyak 4 unit terdiri dari 3 unit kantor kelurahan dan 1 unit kantor kecamatan, kantor militer sebanyak 2 unit terdiri dari kantor polsek dan kantor koramil, dan 5 kantor pelayanan umum lainnya diantaranya Kantor Pos, Kantor Telepon, Balai Karya, Balai Pertemuan dan KUA. Berdasarkan hasil proyeksi penduduk tahun 2037, tidak perlu lagi adanya penambahan sarana pemerintahan dan militer namun perlu adanya pembangunan sarana pelayanan umum yaitu Kantor Pemadam Kebakaran yang berlokasi di Cakke sebagai pusat pelayanan bagi Kecamatan Anggeraja.

b. Sarana Pendidikan

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan penduduk pada tahun 2037 maka sarana pendidikan yang mengalami penambahan yaitu TK sebanyak 3 unit. Sarana pendidikan seperti SD, SMP dan SMA tidak perlu lagi adanya penambahan karena diperkirakan mampu melayani kebutuhan penduduk hingga tahun 2037.

c. Sarana Peribadatan

Berdasarkan hasil proyeksi penduduk, Jumlah sarana peribadatan di Cakke pada tahun 2037 tidak mengalami penambahan dari jumlah sarana peribadatan pada tahun 2017 yaitu 12 unit. Hal ini dikarenakan jumlah sarana peribadatan yang ada pada tahun 2017 diperkirakan masih dapat melayani penduduk pada tahun 2037.

d. Sarana Kesehatan

Distribusi pelayanan kesehatan terhadap penduduk ditentukan oleh ketersediaan sarana kesehatan baik secara kualitas maupun kuantitas. Hasil pengamatan yang dilakukan menunjukkan ketersediaan sarana kesehatan di lokasi studi berupa 1 unit rumah sakit, 1 unit puskesmas, 6 unit posyandu, dan 1 unit apotik. Hasil analisis menunjukkan bahwa sarana kesehatan yang memerlukan penambahan pada tahun 2037 yaitu posyandu, jumlah penduduk pendukung untuk sarana ini adalah 1.250 jiwa maka kebutuhan akan sarana ini yaitu sebanyak 2 unit berdasarkan jumlah penduduk pada tahun 2037

Cakke yaitu 10.999 jiwa. Selain itu sarana kesehatan lainnya yang dibutuhkan untuk memberikan pelayanan kesehatan terhadap penduduk Cakke hingga tahun 2037 yaitu balai pengobatan sebanyak 3 unit.

e. Sarana Perdagangan

Sarana perdagangan merupakan wadah untuk distribusi kebutuhan pokok atau sehari-hari bagi penduduk seperti gula, sabun, beras dan lain sebagainya. Sarana perdagangan yang terdapat di lokasi studi yang terdiri dari 1 unit pasar, 81 unit warung masing-masing tersebar di setiap dusun di Cakke dan 1 unit Bank. Hasil analisis menunjukkan bahwa berdasarkan hasil proyeksi penduduk, sarana perdagangan yang ada mampu melayani kebutuhan penduduk hingga tahun 2037 sehingga tidak perlu lagi adanya penambahan.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

No.	Sarana Perkotaan	Eksisting (2017)	Kebutuhan (2037)	Penambahan	Keterangan
a.	Sarana Pemerintahan dan Pelayanan Umum				
	1. Kantor Kecamatan	1	1	0	
		3	3	0	
	2. Kantor	1	1	0	

	Kelurahan	1	1	0	
	3. Kantor Polsek	1	1	0	
	4. Kantor Koramil	1	1	0	
	5. Kantor Pos	1	1	0	
	6. Kantor Telepon				
	7. Balai Pertemuan				
	8. Balai Karya				
	9.KUA				
b	Sarana Perdagangan				
	1. Pasar	1	1	0	
	2. Warung	8	4	0	
	3. Bank	1	8		
		1	1	0	
c	Sarana Pendidikan				
	1. TK	6	8	2	
	2. SD/MIS	7	7	0	
	3. SMP/MTS	5	5	0	

	4. SMA/SMK/MA	5	7	0	
d.	Sarana Kesehatan				
	1. Puskesmas/Pustu	1	1	0	
	2. Posyandu	6	8	2	
	3. Apotik/Toko Obat	1	1	0	
	4. Tempat Praktek Dokter	2	2	0	
	5. Balai Pengobatan	-	3	3	
e.	Sarana Peribadatan				
	1. Mesjid	1	12	0	
	2. Musholla	2			
		6	6	0	

f.	Sarana Olahraga			
	GOR	-	1	1

Sumber : Hasil Analisis



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dapat disimpulkan :

1. Tingkat ketersediaan sarana perkotaan di Cakke sebagai Ibu Kota Kecamatan dikategorikan baik. Karena jika dilihat dari penilaian untuk sebagian besar jenis sarana memiliki penilaian bobot rata-rata berada di atas 95 %. Walaupun masih terdapat beberapa sarana yang tidak maksimal pelayanannya seperti posyandu dan sarana yang sama sekali belum terdapat di lokasi yaitu Pemadam Kebakaran dan GOR.
2. Berdasarkan hasil proyeksi penduduk maka sarana perkotaan yang dibutuhkan di Cakke pada tahun 2037 diantaranya, Kantor Pemadam Kebakaran sebanyak 1 unit, 2 unit TK, 2 unit posyandu dan 3 unit Balai Pengobatan.

B. Saran

1. Cakke harus memberikan pelayanan yang optimal bagi penduduk sesuai dengan fungsinya yaitu sebagai pusat pelayanan bagi Keseluruhan Wilayah Kecamatan Anggeraja maka disarankan untuk menambahkan sarana perkotaan yang belum tersedia antara lain Posyandu, Pemadam Kebakaran dan GOR.
2. Penelitian dibatasi pada ketersediaan dan kebutuhan sarana perkotaan di Cakke, maka disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk mengkaji ketersediaan dan kebutuhan bidang prasarana di Cakke sebagai salah satu upaya pengembangan Kota Cakke sebagai pusat pelayanan terhadap wilayah hinterlandnya.

DAFTAR PUSTAKA

Adisasmita, Rahardjo. *Pembangunan Pedesaan Dan Perkotaan*. Makassar: Graha Ilmu, 2006.

All About Indonesia, "10 Peringkat Indonesia di Dunia",

<http://wilayahindonesia.blogdetik.com/2010/02/21/10-peringkat-indonesia-di-dunia/> (15 juni 2010).

Badan Pusat Statistik Kabupaten Enrekang. *Kabupaten Enrekang dalam Angka*. Kabupaten Enrekang: BPS, 2008.

Branch C Melville, "Perencanaan Kota Komprehensif" Suatu Pengantar dan Penjelasan, 1995-1996

Budiharjo. E dan Sujarto. D, *Kota Berkelanjutan*, Alumni. Bandung, 1997.

Direktorat Jenderal Penataan Ruang, Departemen Pekerjaan Umum. Modul Terapan "Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17 Tahun 2009," dalam *Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budidaya*. Jakarta, 2008.

Direktorat Jenderal Penataan Ruang, Departemen Pekerjaan Umum. "Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17 Tahun 2009," dalam *Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota, Menteri Pekerjaan Umum, 2009*. Jakarta, 2008.

Departemen Permukiman dan Pengembangan Wilayah, Lokakarya Terbatas "Kebijakan dan Strategi Pembangunan Perkotaan", Jakarta, 2000.

Direktorat Tata Kota dan Tata Daerah, dalam "penyelidikan Masalah Bangunan". Jakarta, 1979.

Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia. *Kamus Tata Ruang*. Jakarta: Medisa, 1998.

Ilhami. *Strategi Pembangunan Perkotaan Di Indonesia*, Usaha Nasional. Surabaya,

1990.

Jayadinata, J.T. *Tata Guna Tanah Dalam Perencanaan Pedesaan Perkotaan Dan Wilayah*. Bandung: ITB, 1992.

Pemerintah Kabupaten Enrekang. 2003, *Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten Enrekang*

Sinulingga, Budi D. *Pembangunan kota, tinjauan regional dan lokal*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999.

Sutarto. D. *Beberapa Pengertian Perencanaan Fisik*. Bharata Karya Aksa, Jakarta, 1995.

Tarigan, R. *Perencanaan Pembangunan Wilayah (Cet. II; Medan, 2005)*, Jakarta: Bumi Aksara, 2005.

Tcahyati. B, *Arah Kebijakan Tata Ruang Nasional Dalam Menghadapi Fenomena Wilayah Mega Urban di Indonesia*, Jurnal PWK, ITB Bandung, 1993.

Adisasmita, Rahardjo. *Teori - Teori Lokasi Dan Pengembangan Wilayah*. Makassar: Graha Ilmu, 2006.

Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Pentafsir Al Qur'an, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama, Jakarta, 1971, h.414.

UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Nasional, *Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional (BKTRN)*, 1992